

**KECENDERUNGAN PERTUMBUHAN INDUSTRI  
DI JAWA BAGIAN BARAT DAN KABUPATEN CIREBON  
SEBAGAI MASUKAN BAGI PENENTUAN JENIS INDUSTRI  
DI KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN CIREBON**

Oleh :  
**ELVI FITROHIYAH**  
**023860027**



**JURUSAN PLANOLOGI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA  
1994**

**KECENDERUNGAN PERTUMBUHAN INDUSTRI  
DI JAWA BAGIAN BARAT DAN KABUPATEN CIREBON  
SEBAGAI MASUKAN BAGI PENENTUAN JENIS INDUSTRI  
DI KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN CIREBON**

**Tugas Akhir Diajukan Kepada  
Jurusan Planologi  
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan**

**Oleh :  
ELVI FITROHIYAH  
023860027**

**Diajukan Pada  
Sidang Ujian Sarjana**

**Tanggal 2 April 1994**

**Ir. Erwin Fahmi, MURP  
Pembimbing**

**Dinyatakan Lulus / Tidak Lulus  
Sarjana Planologi**

**Ir. N. Nurhidayati  
Ketua Panitia Ujian**



**Ir. N. Nurhidayati  
Ketua Jurusan**



## ABSTRAK

Pembangunan jangka panjang pertama Indonesia dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi pembangunan selanjutnya dengan penekanan pada pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri telah menunjukkan perkembangan yang cukup mantap untuk memasuki tahap selanjutnya.

Studi penentuan jenis industri ini sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon, yaitu polutansi rendah, padat karya, dan berorientasi ekspor. Analisis yang dilakukan adalah menentukan industri bebas daftar negatif investasi tahun 1991, serta limbah rendah (standar Jawa Barat), analisis kecenderungan pertumbuhan industri di Kabupaten Cirebon untuk melihat jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan (Tenaga Kerja per Uhit Usaha), analisis Location Quotient (LQ) untuk melihat potensi ekspor suatu jenis industri. Analisis pohon industri dilakukan untuk melihat potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan, serta analisis kecenderungan pertumbuhan industri di Jawa Bagian Barat (Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta) dilakukan sebagai pembandingan bagi industri potensial di Kabupaten Cirebon. Kemudian masing-masing analisis diberi bobot, dengan ketentuan jenis industri yang memiliki bobot terbesar menjadi prioritas pengembangan pertama dan seterusnya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka didapat beberapa jenis industri potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Cirebon sesuai dengan urutan prioritas.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. Tulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian kegiatan akademik di Jurusan Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan pada Institut Teknologi Indonesia.

Sampai saat ini studi penentuan jenis industri di Kabupaten Cirebon belum pernah dilakukan, padahal Kabupaten Cirebon potensial sebagai Kawasan Industri dan sudah direncanakan pembangunannya.

Karena itu, penulis mencoba memberikan masukan untuk menentukan jenis industri yang dapat dikembangkan di Kabupaten Cirebon, dengan menggunakan pendekatan Kecenderungan Pertumbuhan Industri di Jawa Bagian Barat dan Kabupaten Cirebon, serta kebijaksanaan Pemerintah Daerah tentang penentuan jenis industri agar jenis industri tersebut benar-benar potensial untuk dikembangkan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

- Dosen Pembimbing : Ir. Erwin Fahmi, MURP.;
- Dosen Penguji : - Ir. Hendro Sungkoyo, MRP.;
- Ir. Anthony Nasution, MURP.;
- Ir. Iman Sudrajat, MURP.;
- Keluarga Besar PUSTRA - PU;
- Suami dan putra tercinta;
- Ayah, Ibu, dan Saudara;
- Rekan-rekan Mahasiswa Planologi;

serta semua pihak yang telah membantu penulisan ini.

Penulis sadari bahwa tulisan ini masih belum sempurna, maka kritik serta saran untuk kesempurnaan tulisan ini sangat penulis harapkan, semoga tulisan ini ada manfaatnya.

Jakarta, 2 April 1994

Penulis,



## DAFTAR ISI

BAB	Halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Studi .....	1
1.2 Tujuan dan Sasaran Studi .....	5
1.3 Ruang Lingkup Studi .....	5
1.4 Metoda Pendekatan Studi .....	6
1.4.1 Metoda Pengambilan Data .....	7
1.4.2 Metoda Analisis .....	7
1.5 Sistematika Pembahasan .....	10
<b>II. PERKEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI INDONESIA</b>	
2.1 Pengertian Kawasan Industri .....	12
2.2 Perkembangan Kawasan Industri .....	13
2.3 Prospek Pengembangan Kawasan Industri .....	17
<b>III. PERTUMBUHAN INDUSTRI DI KABUPATEN CIREBON</b>	
3.1 Kecenderungan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Jawa Bagian Barat) .....	20
3.1.1 Kebijakan Pemerintah di Bidang Industri .....	20
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Bagian Barat .....	23

3.2	Jenis Industri Potensial di Kabupaten Cirebon dan Jawa Bagian Barat .....	26
3.2.1	Perkembangan Investasi Industri di Kabupaten Cirebon dan Jawa Bagian Barat .....	29
3.2.2	Kebijaksanaan Industri Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon .....	30
3.2.3	Kecenderungan Pertumbuhan Industri di Kabupaten Cirebon .....	36
3.2.4	Pohon Industri Kabupaten Cirebon .....	38
3.2.5	Kecenderungan Pertumbuhan Industri di Jawa Bagian Barat .....	40
<b>IV. JENIS INDUSTRI POTENSIAL DI KABUPATEN CIREBON</b>		
4.1	Jenis Industri Potensial .....	43
4.2	Arahan Pengembangan Industri .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>47</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>49</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor	J u d u l	Halaman
3.1.1	Pertumbuhan Industri Nasional dan Peranannya Dalam PDRB Pelita I Sampai Dengan Pelita IV .....	21
3.2.1	Pemberian Bobot Analisis .....	28
3.2.2	Jenis-jenis Industri Polutansi Rendah dan Bebas Daftar Negatif Investasi Tahun 1991 .....	32
3.2.3	Jumlah Tenaga Kerja Industri di Kabupaten Cirebon dan Jawa Bagian Barat Tahun 1988 .....	34
3.2.4	Analisis LQ Industri di Kabupaten Cirebon dan Jawa Bagian Barat .....	35
3.2.5	Kecenderungan Pertumbuhan Industri di Kabupaten Cirebon Tahun 1986 - 1988 .....	37
3.2.6	Pertumbuhan Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Tambah, di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta (Jawa Bagian Barat) .....	41
4.1.1	Jenis-jenis Industri Prospektif di Kabupaten Cirebon .....	44
4.1.2	Jenis-jenis Industri Potensial Dikembangkan di Kawasan Industri di Kabupaten Cirebon .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	J u d u l	Halaman
I.1	Bagan Alir Pendekatan Studi Kecenderungan Pertumbuhan Industri di Jawa Bagian Barat dan Kabupaten Cirebon Sebagai Masukan Bagi Penentuan Jenis-jenis Industri di Kawasan Industri Kapetakan - Cirebon .....	11
III.1	Bagan Alir Proses Penentuan Urutan Prioritas Jenis Industri di Kabupaten Cirebon .....	27



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	J u d u l	Halaman
A.	Jumlah dan Perkembangan Unit Usaha Industri di Setiap Daerah	
	Tingkat II Jabotabek, Tahun 1984 - 1987 .....	49
B.	Luas Pemanfaatan Kawasan Industri di Jawa Barat .....	50
C.	Kawasan Industri DKI Jakarta dan Jawa Barat, 1991 .....	51
D.	Kawasan Strategis Propinsi Jawa Barat .....	52
E.	Kawasan Pengembangan Sektor-sektor Strategis Kabupaten	
	Subang - Indramayu - Cirebon .....	53
F.	Rumus-rumus Teknik Analisis .....	54
G.	Syarat Kawasan Industri .....	57
H.	Daftar Negatif Investasi Tahun 1991 .....	59
I.	Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Konsumtif	
	di Kabupaten Cirebon Tahun 1987 - 1989 .....	65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Studi

Pembangunan kawasan industri di Indonesia saat ini telah menjadi kebutuhan bagi pengembangan perindustrian nasional. Kawasan industri yang perkembangannya sangat pesat terdapat di DKI Jakarta, karena sebagai ibukota negara memiliki infrastruktur terlengkap dibandingkan dengan kota lain. Namun, keterbatasan lahan menyebabkan kawasan industri berkembang ke Propinsi Jawa Barat sebagai wilayah yang terdekat dengan Jakarta. Salah satu kawasan industri yang saat ini sedang direncanakan pembangunannya adalah Kawasan Industri di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon berada dalam wilayah Jawa Barat, sedangkan industri di Jawa Barat merupakan industri limpahan dari Jakarta<sup>1</sup>, maka industri yang berada di Kabupaten Cirebon memiliki keterkaitan dengan industri yang berada di Jawa Barat dan Jakarta. Kawasan ini diproyeksikan sebagai pendukung bagi kawasan industri yang telah ada di Jawa Bagian Barat (regional).

Faktor yang dominan mempengaruhi penetapan lokasi kawasan industri Kapetakan di Kabupaten Cirebon sudah cukup memenuhi, antara lain : tenaga kerja, daya dukung lahan, fasilitas jalan, pelabuhan, dan kecenderungan pertumbuhan industri yang terus meningkat. Faktor yang sangat penting bagi pembangunan suatu kawasan industri adalah penentuan jenis-jenis industri yang akan menempati kawasan tersebut, karena suatu kawasan industri diperuntukkan bagi berbagai jenis industri

---

<sup>1</sup> *Bagian Ekonomi, Bappeda Kabupaten Cirebon, 1992*  
*Lihat Lampiran A*



yang dalam pembangunannya memerlukan sistem aglomerasi<sup>2</sup> untuk penghematan. Jenis industri yang satu hendaknya tidak menjadi beban bagi industri lainnya, bahkan kalau memungkinkan merupakan industri-industri yang saling menguntungkan secara timbal balik.

Penentuan jenis industri yang dapat dikembangkan di Kawasan Industri di Kabupaten Cirebon, ditentukan berdasarkan kecenderungan pertumbuhan industri di Jawa Bagian Barat dan Kabupaten Cirebon, mengingat :

- Kabupaten Cirebon adalah Daerah Tingkat II di Jawa Barat yang letaknya paling dekat dengan daerah yang sudah lebih dulu berkembang di bidang industri, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jawa Bagian Barat);
- DKI Jakarta sudah tidak memungkinkan untuk dikembangkan sebagai lokasi kawasan industri, maka wilayah sekitarnya dalam hal ini wilayah Jawa Barat menjadi alternatif pengembangan. Pada saat ini pertumbuhan kawasan industri di Jawa Barat berlangsung dari arah Barat ke Timur yaitu Cilegon, Bekasi, Purwakarta, Subang, dan Karawang. Oleh karena itu, penentuan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu lokasi kawasan industri erat kaitannya dengan perkembangan industri yang sudah ada di DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jawa Bagian Barat), maka analisis yang digunakan untuk menentukan jenis industri di Kabupaten Cirebon dikaitkan dengan jenis industri yang ada di Jawa Bagian Barat;
- Rencana lokasi kawasan industri di Kabupaten Cirebon berjarak lebih kurang 9 km dari Pelabuhan Cirebon (Muara Jati) yang saat ini mulai ditingkatkan

---

<sup>2</sup> *Aglomerasi : beberapa unit usaha industri berada dalam suatu kawasan industri dengan penggunaan fasilitas secara bersama*

penggunaannya (dari pelabuhan barang menjadi pelabuhan barang dan orang). Hal ini ditandai dengan perubahan rute Kapal Motor Tatamailau yang semula dari pelabuhan Tanjung Mas Semarang dipindahkan ke pelabuhan Muara Jati Cirebon, serta peresmian Kapal Motor Ciremai oleh Presiden pada tanggal 26 juni 1993. Kedua kapal motor ini melayani rute Cirebon-IBT (Indonesia Bagian Timur)<sup>3</sup>.

Pelabuhan ini dapat menjadi pelabuhan alternatif bagi pengiriman barang-barang ekspor dari daerah lain di Jawa Barat yang selama ini melalui Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pelabuhan Cigading di Kawasan Industri Cilegon<sup>4</sup>.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, telah mencadangkan lahan seluas 18.000 Ha di Propinsi Jawa Barat untuk dikembangkan sebagai kawasan industri<sup>5</sup>. Rincian kawasan tersebut dapat dilihat pada Tabel Pemanfaatan Kawasan Industri di Jawa Barat<sup>6</sup>. Sebagian besar dari luasan tersebut, 16.500 Ha atau 92 persennya berada di wilayah Jawa Barat bagian Utara, yang meliputi Cirebon, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Tangerang, dan Serang. Pada tabel tersebut terlihat perkembangan Kawasan Industri semakin kearah timur, hal ini dapat dilihat pada peta Kawasan Industri DKI Jakarta dan Jawa Barat tahun 1991<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> Kompas, 29 Mei 1992 dan 27 Juni 1993

<sup>4</sup> Selama ini pelabuhan Cirebon telah digunakan sebagai pelabuhan ekspor impor antar pulau dan antar negara

<sup>5</sup> Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 593/SK.629-Bapp/1990

<sup>6</sup> Lihat Lampiran B

<sup>7</sup> Lihat Lampiran C



Daerah Jawa Barat bagian Utara ini termasuk dalam Kawasan Strategis untuk dikembangkan Propinsi Jawa Barat<sup>8</sup>. Kawasan industri di Kabupaten Cirebon direncanakan seluas 500 Ha, yang berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon lokasi kawasan tersebut ditetapkan di wilayah Kecamatan Kapetakan<sup>9</sup>.

Sebagai langkah awal untuk membangun kawasan industri diperlukan informasi mengenai jenis-jenis industri yang dapat dikembangkan, agar industri yang berada di lokasi ini nantinya benar-benar industri yang cocok bagi kawasan industri tersebut. Sampai saat ini jenis-jenis industri yang akan berlokasi di Kawasan Industri di Kabupaten Cirebon belum ditentukan. Karenanya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penentuan jenis-jenis industri di kawasan tersebut.

Kriteria yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tentang jenis industri yang ada di Kawasan industri tersebut adalah sebagai berikut<sup>10</sup> :

- merupakan industri padat karya (labour intensive);
- mempunyai dampak polusi yang relatif ringan, agar tidak mencemari lingkungan/ ekosistem sekitarnya;
- industri tersebut cenderung berorientasi ke ekspor, untuk meningkatkan PDRB Kabupaten DT II Cirebon dalam sektor industri.

---

<sup>8</sup> Lihat Lampiran D

<sup>9</sup> Lihat Lampiran E

<sup>10</sup> Bagian Ekonomi, Bappeda Tk II Kabupaten Cirebon, 1992

## 1.2 Tujuan dan Sasaran Studi

Tujuan dari penelitian ini adalah penentuan jenis-jenis industri di Kawasan Industri di Kabupaten Cirebon, menurut Kecenderungan Pertumbuhan Industri di Jawa Bagian Barat (Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta) dan Kabupaten Cirebon.

Sasaran spesifik yang ingin dicapai adalah :

- a. menganalisis kecenderungan pertumbuhan industri di Jawa Bagian Barat dan Kabupaten Cirebon, guna menentukan industri yang dapat dikembangkan di Kawasan Industri di Kabupaten Cirebon;
- b. menentukan jenis industri yang dapat dikembangkan di kawasan industri di Kabupaten Cirebon, yang sesuai dengan arahan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon, yaitu : padat karya, polutansi rendah, dan berorientasi ekspor. Penentuan jenis industri dilakukan sebagai masukan untuk pengembangan kawasan industri di Kabupaten Cirebon.

## 1.3 Ruang Lingkup Studi

Studi ini menentukan jenis yang dapat dikembangkan di kawasan industri di Kabupaten Cirebon, sehingga pembahasan tentang kawasan industri tidak secara mendalam.

Penentuan jenis industri dapat dilakukan dengan cara menganalisis Kecenderungan Pertumbuhan (Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Tambah), Kebijakan Pemerintah (Nasional, Regional, atau Lokal), Pola Investasi Industri, Ketersediaan Sumber Daya Alam, dan Pola Aliran Barang (keluar-masuk barang di pelabuhan).



Kabupaten Cirebon memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam, kecuali untuk komoditas udang yang terlihat menonjol, sedangkan peningkatan sarana pelabuhan Cirebon masih baru terealisasi, sehingga arus aliran barang pun belum meningkat. Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka pembahasan dibatasi dalam penentuan jenis industri berdasarkan Kecenderungan Pertumbuhan, yaitu dengan melihat perkembangan investasi industri di Kabupaten Cirebon, menganalisis pertumbuhan industri di Jawa Bagian Barat (Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta) dan di Kabupaten Cirebon, sumber daya alam yang dapat dikembangkan, serta Kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon tentang penentuan jenis industri di Kawasan Industri di Kabupaten Cirebon, guna menentukan jenis industri yang cocok di kawasan industri tersebut.

Kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon tentang tingkat polutansi industri, tidak memuat kriteria khusus. Sehingga kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan melihat Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri. Hal ini dilakukan karena Kabupaten Cirebon berada dalam wilayah administrasi Propinsi Jawa Barat.

#### 1.4 Metoda Pendekatan Studi

Metoda pendekatan yang akan dilakukan dibagi menjadi dua bagian, yaitu :  
Metoda Pengambilan Data dan Metoda Analisis.

#### 1.4.1 Metoda Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu survei instansi dan observasi lapangan.

Survei instansi dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari Bappeda Kabupaten Cirebon (RUTR Kawasan Industri Kapetakan, Peta Propinsi Jawa Barat, Peta Kabupaten Cirebon, Data Industri tahun 1986-1988 Kabupaten Cirebon), serta Dinas Perindustrian (Data Industri tahun 1986-1988 Kabupaten Cirebon per Kecamatan). Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh pemahaman terhadap kondisi lapangan sebelum dibangun kawasan industri di Kabupaten Cirebon, yaitu batas-batas rencana kawasan industri, kondisi lahan, serta prasarana dan sarana penunjang<sup>11</sup>.

#### 1.4.2 Metoda Analisis

Variabel yang akan dilihat adalah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Tambah, dan Skala Unit Usaha. Hubungan antar variabel adalah sebagai berikut :

- Variabel Unit Usaha untuk melihat derajat konsentrasi (dominansi) kegiatan industri antara industri di Jawa Bagian Barat dan Kabupaten Cirebon;
- Variabel Tenaga Kerja untuk melihat besarnya kesempatan kerja sektor industri yang diciptakan;
- Variabel Nilai Tambah untuk melihat sifat-sifat industri tersebut dalam kaitannya dengan pemberian pendapatan bagi daerah;

---

<sup>11</sup> Lokasi Rencana Kawasan Industri Kapetakan-Cirebon



- Variabel Skala Unit Usaha untuk mengetahui sifat-sifat industri dalam proses produksinya, bersifat capital intensive atau labour intensive, ataupun merupakan industri-industri skala besar baik dari segi investasi maupun tenaga kerja (Tenaga Kerja per Unit Usaha). Selain itu juga untuk melihat ketergantungan industri terhadap impor bahan baku maupun bahan penolong di Kabupaten Cirebon (Nilai Tambah per Unit Usaha).

Perkembangan investasi industri di Jawa Bagian Barat dan Kabupaten Cirebon dilihat untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan investasi di bidang industri pada wilayah tersebut. Pohon industri digunakan untuk melihat potensi industri daerah yang dapat dikembangkan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.

Pada tahap analisis kualitatif diperlihatkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi regional, iklim usaha industri di Jawa Bagian Barat, dan kebijakan pemerintah tentang investasi di bidang industri. Analisis ini didukung oleh analisis kuantitatif yang meliputi<sup>12</sup> :

#### 1. Analisis Perkembangan Jumlah Penduduk.

Teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah proyeksi penduduk dengan bunga berganda<sup>13</sup>, teknik ini juga dapat dilakukan untuk melihat pertumbuhan angkatan kerja Kabupaten Cirebon. Angkatan kerja Kabupaten Cirebon terus meningkat, sehingga sesuai dengan keinginan Bupati Cirebon agar industri yang berada di

---

<sup>12</sup> Lihat Lampiran F

<sup>13</sup> Suwardjoko Warpani, 1984, *Analisis Daerah dan Kota*

Kabupaten Cirebon bersifat padat karya, agar jumlah penganggur dapat berkurang. Alasan pemakaian teknik ini karena laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cirebon fluktuatif (tidak linier).

## 2. Analisis Pertambahan, Pertumbuhan, dan Konsentrasi.<sup>14</sup>

Analisis ini digunakan untuk melihat pertambahan, pertumbuhan, dan konsentrasi dari variabel yang diamati, yaitu unit usaha, tenaga kerja, investasi, dan nilai tambah.

## 3. Analisis Pohon Industri<sup>15</sup>

Analisis pohon industri dilakukan untuk menentukan jenis-jenis industri yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya alamnya.

## 4. Analisis Location Quotient (LQ).<sup>16</sup>

Perhitungan unit usaha, tenaga kerja, investasi, dan nilai tambah akan menghasilkan estimasi pertumbuhan unit usaha industri prioritas di Kabupaten Cirebon, namun harus disesuaikan dengan arahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon. Karena itu perlu dilakukan perhitungan jenis industri yang dapat bersifat padat karya, orientasi ekspor, dan polutansi rendah. Analisis yang digunakan adalah analisis LQ, agar dapat menganalisis industri dari jumlah tenaga kerja dan potensi orientasinya (ekspor, konsumsi daerah), atau tidak memiliki potensi karena masih impor.

---

<sup>14</sup> Ripukon, 1989, *Rencana KI Jababeka-Bekasi*

<sup>15</sup> *Repelita V Industri*

<sup>16</sup> *Suwardjoko Warpani, 1984, Analisis Daerah dan Kota*

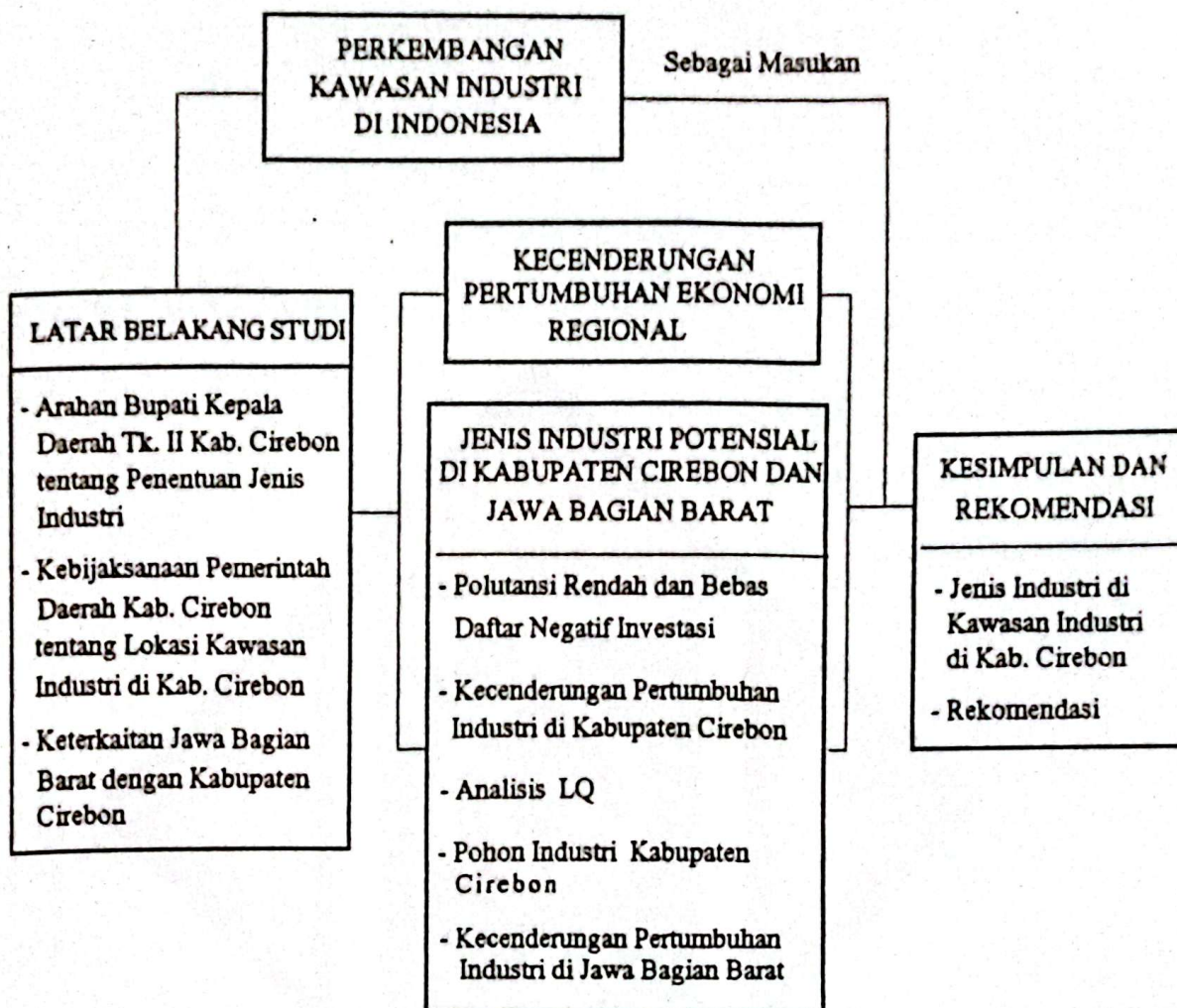


Setelah itu dibandingkan dengan hasil analisis butir (2), untuk melihat jenis industri yang dihasilkan dari analisis tersebut berpolutansi berat atau tidak, dilihat dari tabel industri yang berpolutansi. Akhirnya dapat ditentukan jenis-jenis industri yang dapat berlokasi di kawasan industri di Kabupaten Cirebon. Ruang lingkup studi ini secara skematik dapat dilihat pada gambar I-1.

### 1.5 Sistematika Pembahasan Studi

Studi ini akan dibahas dengan sistematika studi sebagai berikut :

- Bab I : Bab ini mengungkapkan latar belakang, ruang lingkup, metoda pendekatan, serta hasil akhir studi yang diharapkan.
- Bab II : Perkembangan kawasan industri di Indonesia dilihat sebagai pertimbangan untuk penarikan kesimpulan dan penentuan rekomendasi.
- Bab III : Kondisi ekonomi regional (Jawa Bagian Barat) dilihat keterkaitannya dengan pertumbuhan industri di daerah tersebut.
- Bab IV : Jenis industri yang dapat dikembangkan di kawasan industri di Kabupaten Cirebon diperoleh dengan cara melihat industri yang potensial di Kabupaten Cirebon dan Jawa bagian Barat, selanjutnya jenis industri tersebut dapat digunakan juga untuk menentukan jenis industri di kawasan industri Kapetakan.



**Gambar I.1.** Bagan Alir Pendekatan Studi Kecenderungan Pertumbuhan Industri di Jawa Bagian Barat dan Kabupaten Cirebon Sebagai Masukan Bagi Penentuan Jenis Industri di Kawasan Industri di Kabupaten Cirebon



## **BAB II**

### **PERKEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI INDONESIA**

#### **2.1. Pengertian Kawasan Industri**

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang kawasan industri yang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 1989, merupakan kebijaksanaan untuk memberikan kesempatan kepada koperasi, perusahaan swasta nasional dan perusahaan dalam rangka penanaman modal asing (PMA), selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk membangun dan mengusahakan kawasan industri.

Keputusan tersebut memuat juga pengertian tentang Kawasan industri, yaitu :

#### **Pasal 1**

1. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri;
2. Perusahaan kawasan industri adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.

Sedangkan tujuan pembangunan kawasan industri terdapat pada Pasal 2, yaitu :

- mempercepat pertumbuhan industri;
- memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;
- mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Industri;
- menyediakan fasilitas lokasi industri yang berwawasan lingkungan.

Keempat tujuan tersebut merupakan bagian dari program-program pembangunan nasional yang telah dijabarkan dalam berbagai program kegiatan, yaitu :

- program pembangunan sektor industri;
- program pengembangan wilayah;
- program pengelolaan lingkungan hidup.

## 2.2. Perkembangan Kawasan Industri

Pada tahun 1960-an pertumbuhan industri swasta di Indonesia terbatas pada skala industri kecil dan menengah. Perusahaan-perusahaan yang tergolong besar adalah perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi.

Kawasan industri dikenal di Indonesia sejak permulaan tahun 1970-an, dan merupakan perusahaan Pemerintah. Kawasan industri yang paling dikenal adalah PT. SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) dan PT. JIEP (Jakarta Industrial Estate Pulogadung). Saat itu pihak swasta tidak diperbolehkan bergerak dibidang industri dan perkembangan industri sangat lambat, sehingga hampir tidak diketahui kalangan bisnis. Barulah setelah Pemerintah mengeluarkan Keppres No.53/ 1989 tanggal 27 Oktober 1989, bahwa swasta diperkenankan bergerak dalam pengembangan Kawasan Industri.

Perkembangan kawasan industri dapat dibagi dalam 5 periode :<sup>17</sup>

1. Tahun 1969 pembangunan JIEP yang terealisasi tahun 1971 dengan bantuan studi dari Amerika Serikat, tahun 1968 pembangunan SIER yang terealisasi tahun 1972

---

<sup>17</sup> Wisnu Lokanatha, 1992, *Seminar The Property Summit dan Tim Koordinasi Kawasan Industri*, Departemen Perindustrian, 1993



- dengan bantuan studi dari Jerman Barat, tahun 1971 untuk KIC (Kawasan Industri Cilacap) yang beroperasi tahun 1975 dengan bantuan studi dari Australia.
2. Tahun 1972 pembangunan kawasan industri di Medan dan Ujungpandang. Pembangunan Kawasan Industri Medan (KIM) baru terlaksana tahun 1978 dan Kawasan Industri Makasar (KIMA) pada tahun 1982.
  3. Tahun 1980-an direncanakan pendirian LIEP (Lampung Industrial Estate Panjang) dan CIEP (Cirebon Industrial Estate Pegambiran), namun sampai sekarang kedua BUMN ini belum beroperasi.<sup>18</sup>

Kawasan Industri BUMN/BUMD terdiri dari sembilan kawasan industri di Jakarta, Surabaya, Cilacap, Ujung Pandang, Medan, Cilegon, Lampung, dan Cirebon. Alokasi lahan seluas 2.958 ha, pada saat ini telah terisi seluas 1.363 ha (46 %) dan seluas 670 ha siap dipasarkan. Perusahaan yang telah beroperasi 890 buah, umumnya bergerak dalam industri pengolahan logam, kimia, makanan, minuman, tekstil, perkayu,an, elektronika, dan industri percetakan. Menunjang era ekspor non migas, melalui PP No.22/ 1986 dan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian berdirilah KBN (Kawasan Berikat Nusantara).

Selanjutnya status Kawasan Berikat (Bonded Zone) diberikan kepada Batam<sup>19</sup>. Hampir bersamaan waktunya didirikan PPM (Pusat Perkayu,an Marunda) di

<sup>18</sup> Pembangunan industri kecil oleh Direktorat Industri Kecil - Departemen Perindustrian dilakukan dengan membentuk LIK (Lingkungan Industri Kecil) di Semarang, Bandung, Yogyakarta, dan Cilacap.

<sup>19</sup> KBN memiliki luas areal 593 ha, dan telah digunakan 300 ha untuk 133 buah industri, terutama bergerak dalam industri pengolahan produk tekstil dan kayu. Industri yang beroperasi di KBN seluruhnya berorientasi ekspor.



bawah Departemen Keuangan dan KIC (Kawasan Industri Cilegon) yang dibangun oleh Krakatau Steel Group.

4. Sektor kawasan industri sebelum Keppres Nomor : 53/ 1989 hanya dapat dimasuki oleh BUMN. Saat itu kebutuhan tanah industri dengan pertumbuhan sektor industri dari Pelita I sampai dengan Pelita IV sebesar 12 persen pertahun, tidak dapat dipenuhi oleh kawasan industri Pemerintah yang telah disebutkan di atas. Industri-industri kemudian mencari lahannya sendiri dan berlokasi di sembarang tempat, tetapi masih dalam zona industri.

Menjawab kebutuhan tersebut, pihak swasta kemudian berusaha mencari terobosan dengan mendirikan Zona Industri (Industrial Zone). Tanah dijual tanpa melalui prosedur, kemudian dibuat sarana jalan, adapula yang mencari terobosan dengan mendirikan Lingkungan Industri Kecil (LIK).

5. Memasuki Pelita V dengan harapan pemantapan sektor industri sebagai tulang punggung pembangunan menuju era tinggal landas, deregulasi dilakukan terhadap kawasan industri. Pembangunan kawasan industri untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan Keppres No. 53 tahun 1989. Dalam Keppres tersebut swasta dimungkinkan untuk terjun dalam pembangunan kawasan industri. Maka mulailah era bisnis kawasan industri<sup>20</sup>.

Pelaksanaan pembangunan kawasan industri tidak berjalan dengan lancar,

karena :<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Saat ini terdapat 134 perusahaan dengan permohonan pencadangan tanah seluas 38.425 ha, baik yang dikelola Pemerintah maupun BUMN/BUMD dan 24 perusahaan telah beroperasi dengan luas lahan 7.399 ha.

<sup>21</sup> Wisnu Lokanatha, 1991, Seminar The Property Summit.



- Penetapan lokasi kawasan industri belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan pengembangan sektor lainnya secara terpadu;
- Sulitnya pembebasan tanah akibat adanya spekulasi tanah;
- Kapasitas perusahaan kawasan industri yang terbatas, baik dalam aspek manajemen, pendanaan, maupun teknis perencanaan;
- Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana penunjang kawasan industri, seperti tenaga listrik, air bersih, fasilitas telekomunikasi, jalan akses, fasilitas perumahan, dan lain-lain;
- Lahan industri tertentu di luar kawasan industri dianggap lebih menarik dari yang berlokasi di kawasan industri, karena faktor tersedianya jalan, sementara lahan dalam kawasan industri masih dianggap mahal;
- Prosedur yang belum sepenuhnya mendukung percepatan untuk memperoleh ijin pembangunan kawasan industri.

Permasalahan tersebut secara terus menerus diupayakan pemecahannya melalui koordinasi antara departemen dan instansi terkait baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Saat ini telah dihasilkan kebijaksanaan umum pembangunan kawasan industri yang merupakan landasan bagi upaya percepatan pertumbuhan industri, antara lain berupa penataan ruang untuk penetapan lokasi kawasan industri, penetapan alokasi pemanfaatan lahan kawasan industri, penyederhanaan prosedur perizinan, dan prioritas penyediaan sarana penunjang.

### 2.3. Prospek Pengembangan Kawasan Industri

Prospek pengembangan kawasan industri di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga :<sup>22</sup>

#### A. Faktor-faktor yang mendukung :

- Pertumbuhan ekonomi selama Pelita I sampai Pelita IV rata-rata 6,55 % per tahun dan untuk Pelita V diproyeksikan antara 7,00-8,00 %, sedangkan pertumbuhan sektor industri selama Pelita I sampai IV rata-rata sebesar 12,35 %, dan Pelita V diproyeksikan sebesar 12,00-15,00 %. Hal ini merupakan prospek yang cerah bagi bisnis kawasan industri.
- Prospek bisnis kawasan industri, sangat ditentukan oleh jumlah arus investasi asing ke Indonesia.

Pada umumnya, investor menanamkan modalnya di Indonesia, karena :<sup>23</sup>

- Stabilitas politik dan sosial;
- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
- Lalu lintas devisa bebas;
- Jumlah penduduk besar, selain tenaga kerja yang murah juga sebagai pasar potensial untuk barang-barang hasil dari pabrik;
- Sumber bahan mentah yang melimpah;
- Kontrol polusi yang fleksibel;
- Tanah yang relatif lebih murah;
- Harga listrik lebih murah;

<sup>22</sup> Wisnu Lokanatha, 1991, Seminar The Property Summit.

<sup>23</sup> Wisnu Lokanatha, 1991, Seminar The Property Summit.



- Masih menikmati Generalized System of Preferences (GSP) sebagai negara yang perlu dibantu.

#### B. Kendala :<sup>24</sup>

1. Kemungkinan terjadinya over supply, dengan dibukanya puluhan kawasan industri;
2. Kawasan industri harus dibangun dengan persyaratan prasarana/sarana, air bersih (bukan air tanah), fasilitas pengolahan limbah, dan lain-lain;
3. Masih banyak pabrik yang berdiri di luar kawasan industri, bahkan lebih banyak dari yang membeli di kawasan industri;
4. Adanya kebijaksanaan uang ketat, akan mengurangi arus investasi;
5. Tidak adanya listrik, membuat jumlah developer berkurang (kurang infrastruktur).

#### C. Proyeksi :<sup>25</sup>

Permasalahan yang dihadapi dalam bisnis kawasan industri adalah kebutuhan minyak diesel dan kelengkapan peraturan listrik swasta yang sampai saat ini belum terkoordinasi. Permasalahan tersebut dapat dibagi menjadi :

##### a. Jangka Pendek (6-12 bulan) :

Developer akan mendirikan unit kecil untuk listrik, berupa diesel antara 1-4 MVA;

<sup>24</sup> Wisnu Lokanatha, 1991, *Seminar The Property Summit*.

<sup>25</sup> Wisnu Lokanatha, 1991, *Seminar The Property Summit*.

b. Jangka Menengah (1-2 tahun) :

Kemungkinan beberapa developer akan bergabung mendirikan Diesel Power Plant antara 80-120 MVA;

c. Jangka Panjang (3-5 tahun) :

Diharapkan kebijaksanaan moneter telah normal dan listrik tersedia.

Prospek kawasan industri di Indonesia cukup cerah, karena faktor-faktor pendukung yang telah disebutkan di atas<sup>26</sup>. Apabila permasalahan tersebut dapat segera diatasi, maka kawasan industri akan semakin berkembang dengan baik di Indonesia<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Bab ini sebagai masukan untuk penentuan jenis industri, yaitu membuktikan perkembangan Kawasan Industri di Indonesia sangat pesat, sehingga penentuan jenis industri untuk suatu Kawasan Industri sangat penting.

<sup>27</sup> Lihat Lampiran G



**BAB III**  
**PERTUMBUHAN INDUSTRI DI KABUPATEN CIREBON**  
**DAN JAWA BAGIAN BARAT**

**3.1 Kecenderungan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Jawa Bagian Barat).**

Kecenderungan pertumbuhan ekonomi Jawa Bagian Barat (Jawa Barat dan Jakarta), digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan jenis industri di kawasan industri di Kabupaten Cirebon. Selain itu, juga dipertimbangkan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon tentang penentuan jenis industri.

**3.1.1 Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Industri**

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang meliputi pembangunan di segala bidang dituangkan dalam suatu Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN ini merupakan pedoman pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara yang terbagi dalam beberapa tahap, yaitu tahap pembangunan jangka panjang dua puluh lima tahunan dan rencana pembangunan lima tahunan (Repelita). Pembangunan jangka panjang pertama Indonesia dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi pembangunan selanjutnya dengan penekanan pada pembangunan ekonomi.

Sasaran pembangunan ekonomi dalam kurun waktu rencana pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah untuk mewujudkan suatu struktur ekonomi yang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri, sehingga pembangunan industri dilaksanakan atas dasar dukungan sektor pertanian yang kuat.

Perkembangan pembangunan sektor industri selama tahap pertama pembangunan jangka panjang Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.1.1.

**Tabel 3.1.1.**  
**Pertumbuhan Industri Nasional dan Peranannya**  
**dalam PDB Pelita I sampai dengan Pelita IV**

No.	URAIAN	PELITA ( % )			
		I	II	III	IV
1	Pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun	8,8	7,2	6,1	5,1
2	Pertumbuhan rata-rata sektor industri per tahun	13,0	13,7	9,8	12,9
3	Peranan sektor industri terhadap PDB pada akhir Pelita	9,6	10,6	12,5	18,2

Sumber : Wisnu Lokanatha, 1991, Sekilas Bisnis Kawasan Industri, Seminar "The Property Summit" Hilton Hotel, 21 Mei 1991

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sumbangan sektor industri dalam PDB terus mengalami peningkatan, sedangkan pertumbuhan rata-ratanya berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Walaupun pada Pelita III terjadi penurunan pertumbuhan rata-rata sektor industri, namun naik kembali pada Pelita IV, maka sektor ini dapat dikatakan dapat mempertahankan sumbangan untuk peningkatan PDB Nasional.

PDB dari sektor industri Indonesia saat ini telah mencapai 18,4 %, berarti sektor industri telah menunjukkan perkembangan yang cukup mantap untuk memasuki tahap pembangunan selanjutnya.



Walaupun demikian, dalam Pelita V yang merupakan tahapan pematapan kerangka landasan, pemerintah telah menentukan bahwa sektor industri akan lebih ditingkatkan dan diperluas, agar hasilnya dapat lebih memberikan sumbangan yang semakin nyata bagi laju pertumbuhan perekonomian nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka prioritas pengembangan sektor industri dalam kebijakan pemerintah diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut <sup>28</sup>:

1. Pengembangan ekspor hasil industri, sebagai penggerak utama (Pull Factor) untuk mempercepat pertumbuhan industri.
2. Pematapan dan pendalaman struktur industri nasional dalam rangka meningkatkan keterkaitan baik antar sektor industri maupun antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya dalam upaya meningkatkan nilai tambah.
3. Pengembangan industri kecil dalam upaya untuk pemerataan lapangan usaha dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, baik yang terkait dengan pasaran luar negeri (ekspor) maupun dalam negeri.
4. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian untuk memanfaatkan potensi pertanian secara optimal.
5. Pengembangan kemampuan penguasaan teknologi dan rancang bangun, pabrik, rekayasa, dan pembuatan mesin/peralatan. Demikian pula dalam penguasaan dan pengembangan sistem, terutama dalam cabang industri

---

<sup>28</sup> *Jurnal Industri No. 01 Th. 1 Oktober 1989.*

elektronika. Mendorong kemampuan inovasi dalam bidang proses dan produk baru melalui penelitian dan pengembangan terapan.

6. Pengembangan wiraswasta dan tenaga profesional industri baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dengan adanya kebijakan tersebut, maka laju pertumbuhan industri nasional diproyeksikan 10 % per tahun (tanpa migas).<sup>29</sup>

### 3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Bagian Barat

Pengertian Jawa Bagian Barat meliputi propinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Karena itu, pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi di Jawa Bagian Barat meliputi pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut. Sub bab ini mencoba memberi gambaran tentang kondisi perekonomian di kedua wilayah tersebut dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

#### A. Pertumbuhan Ekonomi di DKI Jakarta

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta atas dasar harga konstan tahun 1983 pada tahun 1990 sebesar 8,7 % setiap tahun. Laju pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 7,37 % per tahun.

Apabila dilihat dari kontribusinya dalam struktur perekonomian DKI Jakarta pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1990, maka sektor industri memegang peranan terbesar. Kontribusi sektor industri dalam perekonomian DKI Jakarta sebesar 26,37 % dengan laju pertumbuhan sebesar 8,25 % per tahun untuk

---

<sup>29</sup> *Jurnal Industri No. 01 Th. 1 Oktober 1989.*



industri besar dan sedang, sedangkan laju pertumbuhan industri kecil rumah tangga sebesar 7,26 % per tahun.

Sektor-sektor lain yang mempunyai laju pertumbuhan cukup besar adalah bangunan sebesar 18,86 %; listrik, gas, dan air minum sebesar 18,74 %; perdagangan 8,59 %; jasa-jasa 8,29 %; bank dan lembaga keuangan 7,94 %. Sedangkan sektor pertanian mengalami penurunan pada tahun 1990 sebesar 10,49 persen. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh turunnya nilai tambah sub sektor tanaman pangan sebesar 20,10 %, sub sektor peternakan sebesar 3,6 %, dan sub sektor perikanan sebesar 0,83 %.

#### B. Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Barat

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat periode 1986 - 1990 lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama. Bila sektor migas diperhitungkan, pertumbuhan ekonomi rata-rata Jawa Barat pada tahun 1986 sebesar 6,58 % dan Nasional 5,88 %. Sedangkan bila tanpa migas, pertumbuhan ekonomi rata-rata Jawa Barat sebesar 6,90 % dan Nasional 6,06 % per tahun. Pada tahun 1990, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat (dengan migas) sebesar 9,27 % sedangkan pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia sebesar 7,37 %, bila tanpa migas pertumbuhan ekonomi rata-rata Jawa Barat sebesar 8,75 % sedangkan Indonesia sebesar 7,87 %. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi rata-rata pada periode tersebut bila sektor migas diperhitungkan untuk Jawa Barat sebesar 7,06 % dan untuk Indonesia sebesar 6,3 %, sedangkan bila

tidak memperhitungkan sektor migas, pertumbuhan ekonomi rata-rata Jawa Barat sebesar 7,62 % dan Indonesia sebesar 7,14 %.

Pada dekade tersebut di Jawa Barat telah terjadi perubahan struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran dominasi sektor pertanian ke sektor industri, hal ini dapat dilihat dari kenaikan sektor pertanian pada tahun 1990 sebesar 6,17 %, sedangkan sektor industri pengolahan yang didukung industri besar dan sedang mengalami kenaikan sebesar 13,31 %. Distribusi PDRB sektor pertanian pada tahun 1986 sebesar 22,46 % dan pada tahun 1990 sebesar 21,86 %, berarti terjadi penurunan rata-rata 0,15 % per tahun. Sedangkan sektor industri terjadi kenaikan rata-rata 0,64 % per tahun, yaitu dari 18,11 % pada tahun 1986 menjadi 20,68 % pada tahun 1990. Berdasarkan data tersebut, maka sektor industri untuk tahun-tahun mendatang akan dapat menggeser peranan sektor pertanian di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi pada Pelita IV, laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 6,7 persen per tahun bila tidak menyertakan sektor minyak dan gas. Sedangkan bila sektor minyak dan gas diperhitungkan, maka proyeksi laju pertumbuhannya sebesar 7,4 persen per tahun. Dari nilai tersebut, sektor industri diharapkan dapat mencapai laju pertumbuhan 12 persen per tahun.<sup>30</sup>

Konsekuensi dari tingginya laju pertumbuhan industri di antaranya adalah kebutuhan akan lahan industri yang semakin meningkat. Apabila diperhatikan, daerah-daerah industri di Jawa Bagian Barat berkembang ke arah Barat, dalam hal

---

<sup>30</sup> *Jurnal Industri No. 2 Nopember 1989.*



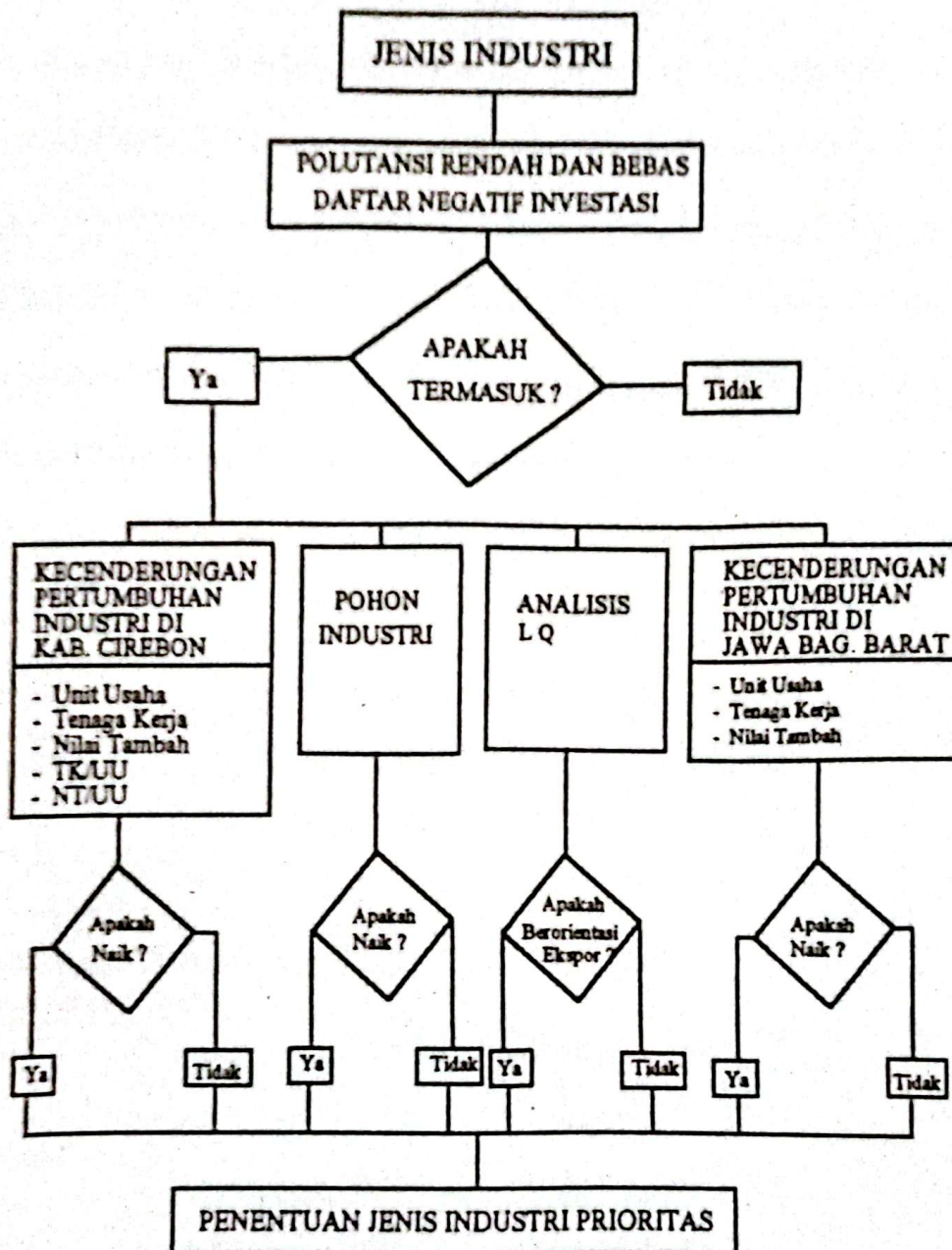
ini Jakarta, ke arah Timur. Saat ini daerah Cikarang (Jawa Barat) telah terpengaruh limbah industri dari Jakarta, dan mungkin akan bergerak lebih ke timur lagi.

Pergeseran lokasi ini terjadi karena lahan industri di Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi untuk ekstensifikasi industri baru. Hal ini terjadi karena kebijaksanaan pemerintah setempat (DKI Jakarta) tentang tingkat polutansi industri yang sangat ketat (SK. Gubernur No. 1608 Tahun 1988, tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai serta Baku Mutu Air Limbah di DKI Jakarta), juga karena harga lahan yang tinggi. Pilihan yang memungkinkan dan lebih ekonomis adalah ekspansi industri ke daerah-daerah sekitar Jakarta yang dalam hal ini masuk dalam wilayah administrasi Propinsi Jawa Barat. Pemerintah Propinsi Jawa Barat tidak seketat DKI Jakarta dalam hal kadar polusi industri, selain itu Propinsi Jawa Barat adalah wilayah yang paling dekat dengan DKI Jakarta dengan harga lahan yang relatif lebih murah dan memiliki kemudahan transportasi, yaitu dengan tersedianya beberapa ruas jalan tol. Ruas jalan tol Jakarta - Merak menghubungkan DKI Jakarta dengan kawasan industri di Cilegon. Jalan tol Jakarta - Cikampek menunjang transportasi antara DKI Jakarta dengan kawasan industri di Purwasuka (Purwakarta-Subang-Karawang).

### **3.2 Jenis Industri Potensial di Kabupaten Cirebon dan Jawa Bagian Barat**

Penentuan jenis industri di Kabupaten Cirebon dan Jawa Bagian Barat dilakukan agar industri yang ada di daerah tersebut adalah industri yang tepat.

Proses penentuan jenis industri dapat dilihat pada Gambar III.1.



Gambar III.1 Bagan Alir Proses Penentuan Urutan Prioritas Jenis Industri di Kabupaten Cirebon



Masing-masing analisis memiliki bobot yang sama, yaitu :

Jenis industri yang memiliki kadar limbah rendah (Standar Propinsi Jawa Barat) dan bebas Daftar Negatif Investasi Tahun 1991 dianalisis menggunakan analisis kecenderungan pertumbuhan industri di Kabupaten Cirebon dengan lima variabel memiliki bobot 50 %, LQ 10 %, pohon industri 10 %, dan kecenderungan pertumbuhan industri di Jawa Bagian Barat dengan tiga variabel memiliki bobot 30 %. Kriteria pemberian bobot dapat dilihat pada Tabel 3.2.1.

**Tabel 3.2.1**  
**Pemberian Bobot Analisis**

Analisis	Variabel	Bobot (%)
Kecenderungan Pertumbuhan Industri di Kabupaten Cirebon	UU, TK, NT, SKU, dan NT/UU	50
Location Quotient ( LQ )	-	10
Pohon Industri	-	10
Kecenderungan Pertumbuhan Industri di Jawa Bagian Barat	UU, TK, dan NT	30

Sumber : Statistik Industri Kabupaten Cirebon Tahun 1986 - 1988  
Statistik Industri DKI Jakarta Tahun 1986 - 1988  
Statistik Industri Jawa Barat Tahun 1986 - 1988

Keterangan : UU : Unit Usaha  
TK : Tenaga Kerja  
NT : Nilai Tambah  
SKU : Skala Unit Usaha  
NT/UU : Nilai Tambah per Unit Usaha

Jenis industri yang memiliki bobot analisis terbesar merupakan jenis industri dengan prioritas pengembangan pertama dan seterusnya. Apabila suatu jenis industri memiliki bobot 10 - 20 % menjadi urutan ke-5, bobot 30 - 40 % menjadi urutan ke-4, dan seterusnya.

### 3.2.1 Perkembangan Investasi Industri di Kabupaten Cirebon dan Jawa Bagian Barat

Cirebon sebagai salah satu kabupaten yang akan menerima limpahan industri dari wilayah Jabotabek, selama kurun waktu tahun 1986-1988 mengalami investasi di bidang industri sebesar rata-rata Rp. 3,75 milyar setiap tahun dengan angka pertumbuhan sebesar 9,82 % per tahun. Investasi industri di Kabupaten Cirebon, meliputi 3 (tiga) kelompok industri, yaitu industri kecil, aneka industri, dan industri kimia dasar (berdasarkan investasi industri dari Dinas Perindustrian Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon) pada tahun 1986 sebesar Rp. 374,5 milyar dan investasi pada tahun 1988 sebesar Rp. 382 milyar<sup>31</sup>. Investasi industri kecil di Kabupaten Cirebon pada tahun 1986 sebesar Rp. 56 juta menjadi Rp. 216 juta pada tahun 1988, atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 % per tahun. Investasi industri untuk Aneka Industri mengalami pertumbuhan sebesar 3,6 % per tahun, yaitu dari Rp. 9,0 juta pada tahun 1986 menjadi Rp. 32 juta pada tahun 1988. Sedangkan investasi industri untuk industri kimia dasar mengalami pertumbuhan sebesar 0,95 % per tahun, yaitu dari Rp. 309 milyar pada tahun 1986 menjadi Rp. 381,852 milyar pada tahun 1988.

Jumlah tersebut memang kecil bila dibandingkan dengan investasi industri yang terjadi di DKI Jakarta, yaitu pada tahun 1986 sebesar Rp. 8.759,6 milyar dan pada tahun 1988 sebesar Rp. 13.434,7 milyar. Pertambahan investasi industri di DKI Jakarta setiap tahun rata-rata sebesar Rp. 2.337,5 milyar dengan laju pertumbuhan sebesar 53,37 % per tahun. Sedangkan investasi industri di

---

<sup>31</sup> *Bappeda Tingkat II Kabupaten Cirebon.*



Jawa Barat pada tahun 1986 sebesar Rp. 28.053 milyar dan investasi pada tahun 1988 sebesar Rp. 47.567 milyar. Propinsi Jawa Barat setiap tahun mendapatkan tambahan investasi rata-rata sebesar Rp. 9.757 milyar dengan laju pertumbuhan 30,22 % per tahun <sup>32</sup>.

Investasi industri di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan, sehingga Kabupaten Cirebon mempunyai prospek yang baik dalam pengembangan bidang industri lebih lanjut.

Bila dilihat dari potensinya <sup>33</sup>, Kabupaten Cirebon dapat menjadi alternatif bagi penempatan kawasan industri yang selama ini terpusat di Wilayah Jabotabek, apalagi dengan adanya rencana pembangunan jalan tol Cikampek-Cirebon tahun 1995 dan fasilitas pendukung lainnya di sekitar Wilayah Cirebon.

### 3.2.2 Kebijakan Industri Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon telah menyatakan kebijaksanaan mengenai jenis-jenis industri yang akan berlokasi di Kawasan Industri di Kabupaten Cirebon. Jenis industri yang diharapkan dapat menempati lokasi tersebut adalah industri yang bersifat padat karya dengan orientasi ekspor dan polutansi rendah.

Penentuan jenis industri yang paling utama yaitu agar jenis industri terpilih merupakan industri dengan kadar limbah rendah (kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II Cirebon yang ketiga). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

---

<sup>32</sup> *Riptikon, 1989, Rencana KI Jababeka-Bekasi.*

<sup>33</sup> *Lihat sub bab 1.1*

Nomor 660.31/ SK/ 694-BKPMD/ 82, tentang Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri. Surat Keputusan tersebut mengatur ambang batas limbah industri.

Jenis industri yang memiliki potensi untuk dikembangkan juga harus terbebas dari ketentuan Daftar Negatif Investasi Tahun 1991<sup>34</sup>. Jenis-jenis industri yang rendah kadar polusinya dan terbebas dari Daftar Negatif Investasi Tahun 1991 disajikan dalam Tabel 3.2.2. Tabel tersebut memperlihatkan jenis industri yang memiliki kadar polutansi rendah dan Bebas Daftar Negatif Investasi sejumlah 22 jenis industri.

Kabupaten Cirebon belum memiliki kriteria ambang batas limbah industri, maka untuk menentukan jenis industri dengan polutansi rendah digunakan standar Propinsi Jawa Barat, yaitu 100 m<sup>3</sup>/hari air limbah, BOD (Biological Oxygen Demand) 150 mg/l, dan SS (Suspended Solid) 250 mg/l.

Industri yang bersifat padat karya adalah industri yang banyak menyerap tenaga kerja (dibahas dalam butir 3.2.3, tentang perbandingan tenaga kerja dengan unit usaha). Kebijakan pemerintah daerah tersebut cukup beralasan, mengingat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cirebon semakin meningkat.

---

<sup>34</sup> Lihat Lampiran H



**Tabel 3.2.2**  
**Jenis-jenis Industri Polutansi Rendah**  
**dan Bebas Daftar Negatif Investasi Tahun 1991**

No.	KODE INDUSTRI (KLUD)	JENIS INDUSTRI	AIR LIMBAH (M <sup>3</sup> /HR)	BOD	SS
1	322	Industri pakaian jadi kecuali utk keperluan kaki	10,00	63,00	100,00
2	323	Industri kulit dan barang dari kulit, kulit imitasi, kecuali untuk keperluan kaki	10,00	75,00	92,50
3	324	Industri barang untuk keperluan kaki dari kulit	10,00	10,00	50,00
4	331	Industri kayu dan barang dari kayu, rumput, rotan, bambu dan sejenisnya	3,62	20,00	35,00
5	332	Industri alat rumah tangga dari kayu	4,00	40,00	60,00
6	341	Industri kertas dan barang-barang dari kertas	10,00	15,00	80,00
7	342	Industri percetakan, penerbitan, dan sejenisnya	12,00	17,00	90,00
8	351	Industri kimia	90,00	60,00	100,00
9	354	Industri hasil minyak bumi dan batu bara (biji plastik, ter, lilin, dan vaselin)	62,00	25,00	25,00
10	355	Industri hasil dari karet	30,00	40,00	10,00
11	356	Industri barang-barang dari plastik	20,00	15,00	50,00
12	361	Industri barang dari keramik, porselen, dan batu	60,00	7,00	150,00
13	363	Industri semen, kapur, dan barang dari semen	50,00	25,00	150,00
14	364	Industri barang bangunan dari tanah liat	48,00	23,00	145,00
15	369	Industri barang-barang galian bukan logam	40,00	10,00	200,00
16	371	Industri dasar, besi, dan baja	50,00	24,00	160,00
17	372	Industri logam dasar non ferous metal termasuk peleburan timah, tembaga, bauksit, & sejenisnya	30,00	10,00	75,00
18	381	Industri barang logam kecuali mesin dan perlengkapannya	30,50	14,00	199,50
19	382	Industri mesin kecuali mesin listrik	14,00	10,00	100,00
20	384	Industri alat-alat pengangkutan	37,50	10,75	102,50
21	385	Industri alat ilmu pengetahuan, timbangan, alat pemeriksaan/penelitian tidak termasuk dalam golongan lainnya, alat potret dan optik	18,00	6,00	111,00
22	390	Industri lain-lain	14,60	9,00	92,00

Sumber : Studi Identifikasi Jenis-jenis Industri Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Industri di Zona Industri Jabotabek, Proyek Pengembangan Kawasan Industri, Departemen Perindustrian dan PT. YUDHA KENCANA WIDYA KONSULTAN, Maret 1991.

Keterangan : - BOD (mg/l) : Biological Oxygen Demand  
 - SS (mg/l) : Suspended Solid (Zat Padat Terlarut)



Peningkatan jumlah penduduk<sup>35</sup> ini secara langsung akan diikuti oleh peningkatan angkatan kerja<sup>36</sup>. Sehingga keberadaan kawasan industri yang berada di Kabupaten Cirebon diharapkan dapat menampung lonjakan angka angkatan kerja yang sekaligus dapat mengurangi pengangguran.

Selanjutnya akan dibahas jenis-jenis industri yang mempunyai orientasi ekspor. Untuk mengetahui hal tersebut digunakan Analisis Location Quotient (LQ), yaitu membandingkan tenaga kerja industri di Kabupaten Cirebon dengan tenaga kerja industri di Jawa Bagian Barat. Keadaan tenaga kerja industri tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2.3.

---

<sup>35</sup> *Penduduk di sini adalah penduduk yang sudah tinggal menetap lebih dari enam bulan, sudah terdaftar, dan memiliki KTP (Sidney Goldstein, Sirkulasi Dalam Konteks Total di Asia Tenggara, PPSK-UGM, 1980).*

<sup>36</sup> *Lihat lampiran I.*



Tabel 3.2.3  
Jumlah Tenaga Kerja Industri di Kabupaten Cirebon  
dan Jawa Bagian Barat Tahun 1988

No.	KODE INDUSTRI (KLUD)	JENIS INDUSTRI	KABUPATEN CIREBON (Orang)	JAWA BAG. BARAT (Orang)
1	322	Industri pakaian jadi kecuali utk keperluan kaki	466	85.144
2	323	Industri kulit dan barang dari kulit, kulit imitasi, kecuali untuk keperluan kaki	21	2.972
3	324	Industri barang untuk keperluan kaki dari kulit	69	10.938
4	331	Industri kayu dan barang dari kayu, rumput, rotan, bambu dan sejenisnya	2.197	26.098
5	332	Industri alat rumah tangga dari kayu	629	9.499
6	341	Industri kertas dan barang-barang dari kertas	-	12.823
7	342	Industri percetakan, penerbitan, dan sejenisnya	-	20.925
8	351	Industri kimia	1.201	120.347
9	354	Industri hasil minyak bumi dan batu bara (biji plastik, ter, lilin, dan vaselin)	-	13.121
10	355	Industri hasil dari karet	4.227	34.814
11	356	Industri barang-barang dari plastik	2.078	32.433
12	361	Industri barang dari keramik, porselen, dan batu	117	8.982
13	363	Industri semen, kapur, dan barang dari semen	186	12.820
14	364	Industri barang bangunan dari tanah liat	190	10.799
15	369	Industri barang-barang galian bukan logam	77	4.366
16	371	Industri dasar, besi, dan baja	-	7.913
17	372	Industri logam dasar non ferous metal termasuk peleburan timah, tembaga, bauksit, & sejenisnya	-	10.273
18	381	Industri barang logam kecuali mesin dan perlengkapannya	338	37.765
19	382	Industri mesin kecuali mesin listrik	88	7.394
20	383	Industri mesin listrik, perlengkapan, & bagiannya	277	33.482
21	384	Industri alat-alat pengangkutan	454	44.458
22	385	Industri alat ilmu pengetahuan, timbangan, alat pemeriksaan/penelitian tidak termasuk dalam golongan lainnya, alat potret dan optik	8	1.851
23	390	Industri lain-lain	-	10.587
<b>J U M L A H</b>			<b>12.623</b>	<b>559.804</b>

Sumber : - Biro Pusat Statistik, 1992  
- Bappeda Tk. II Kab. Cirebon, 1992  
- Hasil perhitungan, 1992



Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang tercantum dalam Tabel 3.2.3, dapat ditentukan jenis-jenis industri yang mempunyai orientasi ekspor, yaitu dengan analisis LQ. Hasil Analisis LQ industri di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel 3.2.4.

Tabel 3.2.4  
Analisis LQ Industri di Kabupaten Cirebon  
dan Jawa Bagian Barat

No.	KODE INDUSTRI (KLUD)	JENIS INDUSTRI	HASIL ANALISIS LQ
1	322	Industri pakaian jadi kecuali utk keperluan kaki	0,18
2	323	Industri kulit dan barang dari kulit, kulit imitasi, kecuali untuk keperluan kaki	0,24
3	324	Industri barang untuk keperluan kaki dari kulit	0,79
4	331	Industri kayu dan barang dari kayu, rumput, rotan, bambu dan sejenisnya	2,89
5	332	Industri alat rumah tangga dari kayu	2,27
6	351	Industri kimia	3,34
7	355	Industri hasil dari karet	4,17
8	356	Industri barang-barang dari plastik	2,20
9	361	Industri barang dari keramik, porselen, dan batu	0,45
10	363	Industri semen, kapur, dan barang dari semen	0,50
11	364	Industri barang bangunan dari tanah liat	0,60
12	369	Industri barang-barang galian bukan logam	0,60
13	381	Industri barang logam kecuali mesin dan perlengkapannya	0,31
14	382	Industri mesin kecuali mesin listrik	0,41
15	384	Industri alat-alat pengangkutan	0,35
16	385	Industri alat ilmu pengetahuan, tumbangan, alat pemeriksaan/penelitian tidak termasuk dalam golongan lainnya, alat potret dan optik	0,14

Sumber : Hasil perhitungan, 1992



Industri yang mempunyai orientasi ekspor di Kabupaten Cirebon berdasarkan Analisis LQ berjumlah 5 (lima) jenis industri, yaitu industri dengan kode 331 (industri kayu dan barang dari kayu, rumput, rotan, bambu, dan sejenisnya), 332 (industri alat rumah tangga dari kayu), 351 (industri kimia), 355 (industri hasil dari karet), dan 356 (industri barang-barang dari plastik).

### 3.2.3 Kecenderungan Pertumbuhan Industri di Kabupaten Cirebon

Kecenderungan pertumbuhan industri dapat dilihat dari jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, dan besarnya nilai tambah. Sedangkan untuk melihat industri potensial yang perlu dikembangkan di suatu daerah dapat diketahui melalui skala unit usaha dan perbandingan unit usaha dengan nilai tambah<sup>37</sup>.

Kecenderungan pertumbuhan industri di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel 3.2.5.

---

<sup>37</sup> Lihat sub bab 1.4.2.

Tabel 3.2.5  
Kecenderungan Pertumbuhan Industri di Kabupaten Cirebon  
Tahun 1986 - 1988

No.	KODE INDUSTRI (KLLI)	J E N I S I N D U S T R I	UNTUSAHWA		TENAGA KERJA		NILAI TAMBAH (Rp 1.000)		TK/UUU			NT/UUU				
			1986	1988	1986	1988	1986	1988	1986	1988	1986	1988	1986	1988		
1.	322	Industri pakaian jadi kecuali utk keperluan kaki	2	2	347	466	17,15	643.806	980.275	26,13	173,50	233,00	17,15	321.903,00	450.112,50	26,13
2	323	Industri kulit dan barang dari kulit, kulit imitasi, kecuali untuk keperluan kaki	1	1	15	21	20,00	66.923	95.643	21,47	15,00	21,00	20,00	60.923,00	95.603,00	21,47
3	324	Industri barang untuk keperluan kaki dari kulit	1	1	26	60	82,60	75.206	163.435	58,54	26,00	60,00	82,60	75.206,00	163.435,00	58,54
4	331	Industri kayu dan barang dari kayu, rumput, rotan, bambu, dan sejenisnya	3	15	200	2.197	364,53	1.684.884	5.385.656	109,82	88,33	146,47	32,91	561.629,00	259.043,73	-
5	332	Industri alat rumah tangga dari kayu	2	5	75	148	192,50	335.176	1.842.830	224,90	74,00	125,80	35,00	167.568,00	368.566,20	59,96
6	351	Industri kimia	1	8	350	1.201	569,91	843.094	18.090.671	904,26	97,00	150,13	27,30	843.094,00	2.011.333,98	89,28
7	355	Industri hasil dari karet	2	20	450	4.227	853,21	1.010.598	18.505.359	665,56	117,00	211,35	40,32	505.209,00	925.267,95	41,56
8	356	Industri barang-barang dari plastik	1	22	1.050	131	2.078	743,13	525.018	8.541.787	763,48	131,00	94,45	525.018,00	308.263,05	-
9	361	Industri barang dari keramik, porselen, dan batu	1	1	97	117	10,31	455.299	488.677	3,67	97,00	117,00	10,31	455.299,00	488.677,00	3,67
10	363	Industri semen, kapur, dan barang dari semen	3	2	154	186	10,30	1.811.226	2.373.821	15,53	51,33	93,00	40,59	603.742,00	1.188.910,50	48,30
11	364	Industri barang bangunan dan tanah liat	5	5	226	190	-	278.712	266.247	-	45,60	38,00	-	55.742,40	53.249,00	-
12	369	Industri barang-barang galian bukan logam	1	1	68	77	6,62	258.482	296.994	7,45	68,00	77,00	6,62	258.482,00	296.994,00	7,45
13	381	Industri barang logam kecuali mesin dan perengkapannya	3	3	313	339	3,90	2.045.727	3.608.696	38,20	104,33	112,67	3,97	681.909,00	1.202.869,33	38,20
14	382	Industri mesin kecuali mesin listrik	1	1	74	88	9,46	215.470	911.032	101,41	74,00	88,00	9,46	215.470,00	911.032,00	101,41
15	394	Industri alat alat pengangkutan	2	2	490	454	-	2.277.234	3.807.913	34,93	245,00	227,00	-	1.138.617,00	1.933.956,50	34,93
16	385	Industri alat lain pengotakan, tembaga, alat pemertasaan/penelekian tidak termasuk dalam golongan lainnya, alat potret dan optik	1	1	6	8	16,67	29.760	52.223	37,74	6,00	8,00	16,67	29.760,00	52.223,00	37,74

Sumber: Hasil perhitungan, 1992

Keterangan:

UU = Unit usaha

TK = Tenaga kerja

NT = Nilai tambah

\* terjadi penurunan / tidak mengalami kenaikan



Tabel di atas memperlihatkan bahwa, hampir seluruh jenis industri yang berada di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan. Hal tersebut dilihat berdasarkan kecenderungan pertumbuhan industri di daerah tersebut, dengan variabelnya unit usaha, tenaga kerja, dan nilai tambah, kecuali pada variabel Unit Usaha banyak terjadi penurunan atau tidak mengalami peningkatan. Apabila terdapat jenis industri yang mengalami kenaikan, tetapi tidak termasuk dalam jenis industri pada tabel 3.2.2, maka jenis industri tersebut tidak dapat dikembangkan.

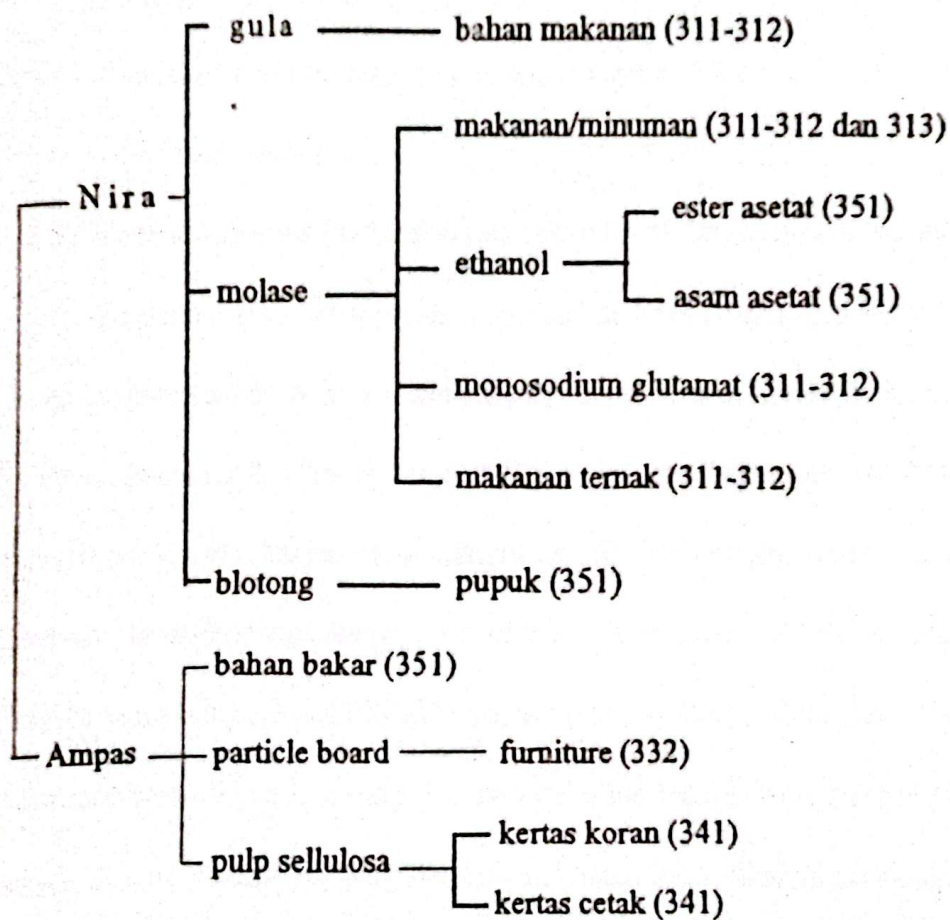
#### 3.2.4 Pohon Industri Kabupaten Cirebon

Sumber daya alam Kabupaten Cirebon yang paling menonjol adalah komoditas udang, dengan pemasaran mencakup Jawa Barat dan Jakarta. Pada tahun 1985 produksi udang di Kabupaten Cirebon sebesar 415 ton (2,72% dari seluruh produksi perikanan sebesar 14.847 ton) dan tahun 1989 sebesar 2.695 ton (17,68 % dari seluruh produksi perikanan sebesar 17.416 ton). Berarti, selama kurun waktu tersebut mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 1,37%. Sedangkan hasilnya sebesar Rp. 42.995 juta pada tahun 1985 dan Rp. 11.018.255 juta pada tahun 1989, berarti kenaikan rata-rata sebesar Rp. 2.743.815 juta per tahun.

Komoditas lain yang menonjol adalah tebu. Tebu ini berasal dari perkebunan rakyat, dengan daerah pemasaran Jawa Barat. Produksi tebu pada tahun 1985 sebesar 604.875 ton dan pada tahun 1989 sebesar 687.212,13 ton, maka kenaikan rata-rata per tahun sebesar 3,19%. Hasil yang didapat dari tebu sebesar Rp. 19.265,044 juta pada tahun 1985 dan sebesar Rp. 52.119,215 juta

pada tahun 1989, sehingga kenaikan rata-rata sebesar Rp. 8.213.293 juta per tahun.

Pohon industri tebu adalah :



Komoditas udang tidak terdapat pohon industrinya<sup>38</sup>, namun dari komoditas udang dapat dihasilkan industri kerupuk dan terasi. Industri ini termasuk dalam jenis industri makanan (311-312).

<sup>38</sup> *Repelita V Industri-Departemen Perindustrian.*



Berdasarkan analisis pohon industri tersebut, maka di Kabupaten Cirebon terdapat 5 jenis industri yang dapat dihasilkan dari sumber daya alam Kabupaten Cirebon, yaitu :

- Industri makanan ( 311-312 );
- Industri minuman ( 313 );
- Industri alat-alat rumah tangga dari kayu ( 332 );
- Industri kimia ( 351 ).

### 3.2.5 Kecenderungan Pertumbuhan Industri di Jawa Bagian Barat

Kecenderungan pertumbuhan industri di Jawa Bagian Barat dibahas untuk bahan perbandingan bagi kecenderungan pertumbuhan industri di Kabupaten Cirebon. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon menginginkan jenis industri yang padat karya untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Cirebon. Jumlah tenaga kerja yang dilihat dalam studi ini adalah tenaga kerja industri yang hanya berada di Kabupaten Cirebon, karena Kabupaten Cirebonlah yang mendapat akibat langsung dari pertumbuhan tenaga kerja industri yang akan berada di sana. Sehingga faktor Skala Unit Usaha tidak dibahas dalam studi ini.

Nilai Tambah per Unit Usaha (NT/UU) yang dilihat adalah kemampuan Kabupaten Cirebon dalam pengadaan dan tingkat ketergantungan suatu industri terhadap bahan baku di Kabupaten Cirebon. Hal ini berarti pembahasan Nilai Tambah per Unit Usaha hanya untuk Kabupaten Cirebon saja, tidak berlaku untuk Jawa Bagian Barat. Pertumbuhan unit usaha, tenaga kerja, dan nilai tambah di Jawa Bagian Barat dapat dilihat pada Tabel 3.2.6.



Tabel 3.2.6  
Pertumbuhan Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Tambah  
di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta (Jawa Bagian Barat)

No.	KODE INDUSTRI (KLU)	JENIS INDUSTRI	UNIT USAHA		TENAGA KERJA		NILAI TAMBAH (Rp. 1.000)				
			1986	1988	P (%)	1986	1988	P (%)	1986	1988	P (%)
1.	322	Industri pakaian jadi kecuali urtuk keperluan kaki	436	533	11,12	63.125	85.144	34,88	157.963.192	231.533.996	68,08
2.	323	Industri kulit dan barang dari kulit, kulit imitasi, kecuali urtuk keperluan kaki	41	49	9,76	2.077	2.972	21,55	6.950.898	11.823.281	29,29
3.	324	Industri barang urtuk keperluan kaki dan kulit	81	96	9,26	6.318	10.938	36,56	16.410.419	28.477.577	36,77
4.	331	Industri kayu dan barang dari kayu, rumpuk, rotan, bambu dan sejenisnya	111	196	38,29	10.971	26.098	68,89	57.813.051	77.538.074	17,56
5.	332	Industri alat rumah tangga dari kayu	102	113	5,39	6.381	9.499	24,43	15.936.547	28.204.168	38,49
6.	341	Industri kertas dan barang-barang dari kertas	70	76	4,29	11.286	12.823	2,38	75.660.147	162.044.325	102,69
7.	342	Industri percetakan, penerbitan, dan sejenisnya	202	231	7,18	18.810	20.925	5,62	125.278.338	157.372.419	12,81
8.	351	Industri kimia	73	85	8,22	11.333	12.347	4,74	114.370.526	173.766.127	25,97
9.	355	Industri hasil dan karet	156	176	6,41	23.205	34.814	25,02	24.708.201	150.321.497	254,59
10.	356	Industri barang-barang dari plastik	280	351	12,68	25.767	32.430	12,94	43.795.452	125.786.688	94,61
11.	361	Industri barang dari keramik, porselen, dan batu	17	24	20,59	6.759	8.982	16,46	24.708.201	141.680.347	236,71
12.	363	Industri semen, kapur, dan barang dari semen	146	140	-	9.515	12.820	17,37	102.589.486	181.865.571	24,82
13.	364	Industri barang benyuan dari tanah liat	257	252	-	11.294	10.799	-	13.780.588	15.109.631	4,92
14.	369	Industri barang-barang galian bukan logam	42	58	47,62	3.367	4.366	45,53	12.780.320	16.854.530	15,94
15.	371	Industri dasar, besi, dan baja	16	22	18,75	9.957	7.913	-	77.727.368	489.250.754	264,72
16.	381	Industri barang logam kecuali mesin & perengkapannya	254	304	9,80	30.788	37.765	11,37	101.119.893	307.763.046	24,47
17.	382	Industri mesin kecuali mesin listrik	76	88	7,89	5.598	7.394	16,04	23.072.975	66.102.878	93,25
18.	384	Industri alat alat pengangkutan	147	156	3,06	39.060	44.458	6,90	456.602.406	671.575.276	23,54
19.	385	Industri alat ilmu pengetahuan, bangunan, alat pemeliharaan/pemeliharaan tidak termasuk dalam golongan lainnya, alat optik dan optik	15	18	10,00	1.513	1.851	11,17	4.334.483	6.717.850	27,48
20.	390	Industri lain-lain	65	96	23,05	6.743	10.587	28,60	21.034.204	34.128.125	31,12
		J U M L A H	4.800	5.226	323,97	617.132	765.654	447,05	3.828.590.305	4.963.809.489	264,12

Sumber : - Biro Pusat Statistik, 1992  
- Hasil perhitungan, 1992

Keterangan : (-) terjadi penurunan  
P nilai pertambahan



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, sebagian besar variabel tersebut mengalami kenaikan. Kenaikan rata-rata variabel Unit Usaha sebesar 12,96 %, Tenaga Kerja 18,63 %, dan Nilai Tambah sebesar 9,77 %. Hal ini terjadi karena pertambahan unit usaha, pertambahan tenaga kerja, dan kenaikan pendapatan daerah.

Variabel Unit Usaha yang tidak mengalami kenaikan dikarenakan jumlahnya tidak bertambah, demikian juga pada variabel Tenaga Kerja, sedangkan variabel Nilai Tambah juga tidak mengalami kenaikan karena industri tersebut tidak meningkatkan pendapatan daerah.

Variabel yang tidak mengalami kenaikan tersebut adalah :

- \* Unit Usaha, untuk jenis industri :
  - 363 semen, kapur dan barang dari semen
  - 364 barang bangunan dari tanah liat
- \* Tenaga Kerja, untuk jenis industri :
  - 314 tembakau
  - 364 barang bangunan dari tanah liat
  - 371 industri dasar, besi, dan baja
- \* Nilai Tambah, untuk jenis industri :
  - 314 tembakau.

## BAB IV JENIS INDUSTRI POTENSIAL DI KABUPATEN CIREBON

### 4.1. Jenis Industri Potensial

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai tingkat prioritas pengembangan industri berdasarkan hasil analisis pada sub bab 3.2.1 sampai 3.2.5. Hasil pembahasan dalam sub bab ini dituangkan dalam Tabel 4.1.1, berupa jenis-jenis industri prospektif yang dapat dikembangkan di Kabupaten Cirebon.

Tabel 4.1.1 memperlihatkan bahwa Kabupaten Cirebon memiliki 22 jenis industri yang termasuk dalam prioritas industri prospektif. Penentuan prioritas industri prospektif berdasarkan kriteria yang terdapat di Kabupaten Cirebon, sehingga jenis-jenis industri yang termasuk di dalamnya adalah jenis industri yang sesuai untuk dikembangkan di Kabupaten Cirebon.

Hasil analisis yang diperlihatkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) urutan prioritas (I - V). Urutan tersebut didasarkan pada jenis industri yang paling memenuhi kriteria, baik menurut kecenderungan pertumbuhan industri di Jawa Bagian Barat dan Kabupaten Cirebon, maupun menurut kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon.

Hasil analisis pada Tabel 4.1.1 adalah jenis-jenis industri yang dapat dikembangkan di Kabupaten Cirebon. Jenis-jenis industri yang dapat dikembangkan di Kawasan Industri di Kabupaten Cirebon berdasarkan hasil analisis terdahulu dapat dilihat pada Tabel 4.1.2.



Tabel 4.1.1  
 Jenis-jenis Industri Prospektif di Kabupaten Cirebon

No	KODE INDUSTRI (KLUJ)	JENIS INDUSTRI	KECEMERINGAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DI KABUPATEN CIREBON						LO	POHON INDUSTRI	KECEMERINGAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DI JAWA BAG. BARAT			SIBOT (%)	USULTAN PERUBAHAN
			UU	TK	NT	SKU	NTABU	UU			TK	NT			
1	322	Industri pakaian jadi kecuak untuk keperluan kulit	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	70	++++	
2	323	Industri kulit dan barang dari kulit, kulit imitasi, kecuak untuk keperluan kulit	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	70	++++	
3	324	Industri barang untuk keperluan kulit dari kulit	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	70	++++	
4	331	Industri kayu dan barang dari kayu, numpuk, rolan, bambu dan sejenisnya	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	80	++++	
5	332	Industri alat rumah tangga dari kayu	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100	++++	
6	341	Industri kertas dan barang-barang dari kertas	0	0	0	0	0	0	0	+	+	+	40	+++	
7	342	Industri percetakan, penerbitan, dan sejenisnya	0	0	0	0	0	0	0	-	+	+	30	++	
8	351	Industri kimia	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100	++++	
9	354	Industri hasil minyak bumi dan batu bara (bijih plastik, ter, lilin, vasetin)	0	0	0	0	0	0	0	-	+	+	30	++	
10	355	Industri hasil dari karet	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	90	++++	
11	356	Industri barang-barang dari plastik	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	80	++++	
12	361	Industri barang dari keramik, porselen, tanah liat, & batu	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	70	++++	
13	363	Industri semen, kapur, dan barang dari semen	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	70	++++	
14	364	Industri barang bangunan dari tanah liat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
15	369	Industri barang-barang galian bukan logam	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	60	++++	
16	371	Industri dasar, besi, dan baja	0	0	0	0	0	0	0	-	+	+	30	++	
17	372	Industri logam dasar non-ferrous metal termasuk peleburan timah, tembaga, bauksit, dan sejenisnya	0	0	0	0	0	0	0	-	+	+	30	++	
18	381	Industri barang logam kecuak mesin & perengkapannya	-	-	+	+	+	-	-	+	+	+	60	++++	
19	382	Industri mesin kecuak mesin listrik	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	70	++++	
20	384	Industri alat-alat pengangkutan	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	40	+++	
21	385	Industri alat ilmu pengetahuan, timbangan, alat pemeliharaan, alat optik termasuk dalam golongan lainnya, alat potret dan optik	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	70	++++	
22	390	Industri pertanian	0	0	0	0	0	0	0	-	+	+	30	++	

Sumber - Tabel 3.2.2 - 3.2.5  
 - Hasil perhitungan, 1992

Keterangan + Industri yang memenuhi kriteria prospektif  
 - Industri yang tidak memenuhi kriteria prospektif  
 o Industri tersebut tidak terdapat di Kabupaten Cirebon  
 • Penentuan urutan prioritas pengembangan

UU : Unit usaha  
 TK : TK Tenaga Kerja  
 NT : Nilai Tambah  
 SKU : Skala unit usaha



Berdasarkan tabel di atas, maka jenis jenis industri yang dapat dikembangkan di Kawasan Industri di Kabupaten Cirebon berjumlah 22 jenis. Pengembangan jenis-jenis industri tersebut dapat dilakukan bertahap sesuai dengan urutan prioritas seperti yang tertera pada Tabel 4.1.2.

Tabel 4.1.2  
Jenis-Jenis Industri Potensial Dikembangkan  
di Kawasan Industri di Kabupaten Cirebon

No.	KODE INDUSTRI (KLUD)	JENIS INDUSTRI	URUTAN PRIORITAS	
1	322	Industri pakaian jadi kecuali untuk keperluan kaki	*****	II
2	323	Industri kulit dan barang dari kulit, kulit imitasi, kecuali untuk keperluan kaki	*****	II
3	324	Industri barang untuk keperluan kaki dari kulit	*****	II
4	331	Industri kayu dan barang dari kayu, rumput, rotan, bambu, dan sejenisnya	*****	II
5	332	Industri alat rumah tangga dari kayu	*****	I
6	341	Industri kertas dan barang dari kertas	****	IV
7	342	Industri percetakan, penerbitan, dan sejenisnya	***	IV
8	351	Industri kimia	*****	I
9	354	Industri hasil minyak bumi dan batu bara (biji plastik, ter, lilin, vaselin)	***	IV
10	355	Industri hasil dari karet	*****	I
11	356	Industri barang-barang dari plastik	*****	II
12	361	Industri barang dari keramik, porselen, tanah liat, dan batu	*****	II
13	363	Industri semen, kapur, dan barang dari semen	*****	II
14	364	Industri barang bangunan dari tanah liat	*	V
15	369	Industri barang-barang galian bukan logam	*****	III
16	371	Industri dasar, besi, dan baja	***	IV
17	372	Industri logam dasar non ferous metal termasuk peleburan timah, tembaga, bauksit, dan sejenisnya	***	IV
18	381	Industri barang dari logam kecuali mesin dan perlengkapannya	*****	III
19	382	Industri mesin, kecuali mesin listrik	*****	II
20	384	Industri alat-alat pengangkutan	****	IV
21	385	Industri alat-alat ilmu pengetahuan, timbangan, alat-alat pemeriksaan/ penelitian yang tidak termasuk dalam golongan lainnya, alat potret, dan optik	*****	II
22	390	Industri lain-lain	***	IV

Sumber : - Tabel 4.1.1.

- Hasil perhitungan, 1992

Keterangan : \* Penentuan urutan prioritas pengembangan



## 4.2 Arahana Pengembangan

Penentuan jenis industri adalah langkah awal dalam membangun kawasan industri, agar jenis industri yang nantinya berlokasi di kawasan industri tersebut benar-benar dapat dikembangkan. Penentuan jenis industri yang akan berlokasi di Kabupaten Cirebon tersebut sampai saat ini belum dilakukan. Karena itu, penentuan jenis industri yang telah dilakukan di atas dapat digunakan sebagai acuan bagi penentuan jenis industri yang akan berada di kawasan industri di Kabupaten Cirebon.

Pengembangan industri lebih lanjut perlu dilakukan beberapa studi, antara lain :

- Studi kawasan industri;
- Studi minat investasi.

Studi kawasan industri meliputi :

- Studi kelayakan lingkungan, yang meliputi aspek-aspek fisik, kimia, biologis, dan sosial ekonomis.
- Studi kelayakan ekonomi, menyangkut aspek pendanaan dan proses produksi.
- Studi kelayakan teknis, menyangkut aspek sarana dan prasarana.

Studi minat investasi meliputi :

- Studi sektor investasi yang diminati.
- Studi jenis investasi yang diminati.
- Studi luas kapling yang dibutuhkan untuk masing-masing jenis industri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal, 1991, Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal.
- Biro Pusat Statistik, 1990, Statistik Industri Indonesia tahun 1986 - 1988. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Departemen Perindustrian, 1989, Jurnal Industri No. 01 Tahun I Oktober 1989. Departemen Perindustrian. Jakarta.
- , 1989, Jurnal Industri No. 02 Tahun I Nopember 1989. Departemen Perindustrian. Jakarta.
- dan PT. Yudha Kencana Widya Konsultan, 1991, Studi Identifikasi Jenis-jenis Industri Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Industri di Zona Industri Jabotabek. Proyek Pengembangan Kawasan Industri Departemen Perindustrian dan PT. Yudha Kencana Widya Konsultan. Maret 1991. Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum, 1991, Peranan Departemen Pekerjaan Umum dalam : Menunjang Investasi Swasta dan Mendorong Investasi Swasta Dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana. Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Tanggal 5 Juni 1991.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1990, RUTR Wilayah Dalam Rangka Kawasan Industri Bekasi. Direktorat Tata Kota dan Daerah, Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Goldstein, S., 1980. Sirkulasi Dalam Konteks Total di Asia Tenggara. PPSK - UGM. Yogyakarta.
- Hendratno R., 1991, Peningkatan Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk dalam Pembangunan Nasional. Direktorat Sungai, Dirjen Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Kantor Statistik Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 1986 - 1988. Kantor Statistik Kabupaten Cirebon.
- Kantor Statistik Jawa Barat, Statistik Industri Jawa Barat Tahun 1986 - 1988. Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat.



No.	KODE INDUSTRI (K13)	JENIS INDUSTRI	JAKARTA SELATAN			JAKARTA TIMUR			JAKARTA PUSAT			JAKARTA BARAT			JAKARTA UTARA			DKI JAKARTA			BOGOR			TANGERANG			BEKASI			KODYA BOGOR			BOTABEK			JABOTABEK		
			1984	1987	APM	1984	1987	APM	1984	1987	APM	1984	1987	APM	1984	1987	APM	1984	1987	APM	1984	1987	APM	1984	1987	APM	1984	1987	APM	1984	1987	APM	1984	1987	APM			
1	311.312	Industri tekstil	16	27	3	22	34	4	20	20	0	58	66	3	39	49	3	155	196	14	27	52	0	27	47	7	6	27	7	4	6	1	64	132	22	218	328	35
2	313	Industri makanan	6	2	-1	8	5	-1	4	2	-1	13	5	-3	2	1	0	33	15	-6	2	9	2	5	6	0	3	5	1	0	0	0	10	20	3	43	35	-3
3	314	Industri minuman	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4	321	Industri kimia	108	88	-7	16	15	0	14	14	0	51	51	0	25	37	4	214	205	-3	21	28	2	17	48	10	6	16	3	1	1	0	45	93	18	259	258	13
5	322	Industri petrokimia dan kimia lainnya	12	33	7	5	17	4	5	34	10	45	136	30	20	72	15	95	292	66	5	15	3	3	16	5	2	11	3	2	5	1	12	49	12	157	347	70
6	323	Industri logam dan barang dari logam	0	0	0	2	2	0	1	1	0	4	4	0	2	3	0	9	10	0	2	4	1	1	4	1	0	2	1	2	0	-1	5	10	2	14	20	2
7	324	Industri barang kerajinan	2	2	0	5	5	0	4	7	1	10	11	-2	4	10	2	33	35	1	4	0	1	0	2	1	0	0	0	0	5	2	4	15	4	37	90	4
8	331	Industri kayu dan barang dari kayu	0	0	0	6	9	1	1	2	0	6	10	1	3	0	2	16	29	4	0	7	2	2	17	5	0	6	2	0	0	0	2	30	9	19	69	14
9	332	Industri tekstil dan barang dari tekstil	11	12	0	11	13	1	2	4	1	6	10	1	0	10	3	30	19	6	2	5	1	1	8	2	2	0	2	0	1	0	5	22	6	35	71	12
10	341	Industri kimia dan barang dari kimia	1	1	0	4	6	1	1	1	0	2	4	1	4	6	1	12	18	2	1	8	2	10	23	4	2	9	2	0	0	0	13	40	9	25	58	11
11	342	Industri perikanan, perikanan, dan sebagainya	10	22	1	22	33	4	19	45	2	31	40	3	4	22	6	114	162	16	3	5	1	2	7	2	0	4	1	1	3	1	6	19	4	121	181	20
12	351	Industri tekstil	2	2	0	10	10	0	2	1	0	1	1	0	7	9	1	22	23	0	10	16	2	7	11	1	2	0	0	0	0	19	35	5	41	58	6	
13	352	Industri barang kerajinan	10	16	-1	30	39	3	14	19	2	25	31	2	15	24	3	102	129	9	22	35	4	17	37	7	5	15	3	1	3	1	45	90	15	147	219	24
14	353	Industri tekstil dan kerajinan	3	2	0	3	2	0	2	4	1	4	9	2	7	6	0	19	23	1	9	24	5	12	15	1	1	4	1	3	6	1	25	49	0	44	72	9
15	354	Industri barang kerajinan dan tekstil	2	4	1	10	11	0	6	7	0	49	76	9	56	54	-1	123	152	10	6	23	6	10	50	7	2	16	5	0	2	1	30	91	19	161	243	27
16	361	Industri barang dari keramik, porselin, dan batu	0	0	0	3	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	5	4	0	2	4	1	5	6	0	0	2	1	0	0	0	7	12	2	12	16	1
17	362	Industri logam dan barang dari logam	5	1	-1	4	3	0	0	0	0	5	3	-1	5	3	-1	19	10	-3	0	1	0	0	2	1	0	1	0	1	1	0	1	5	1	20	15	-2
18	363	Industri kimia, tekstil, dan barang dari kimia	15	4	-4	12	5	-2	2	0	-1	22	4	-6	7	9	1	58	22	-12	13	18	2	6	9	1	1	8	2	2	1	0	22	36	5	80	58	-7
19	364	Industri barang kerajinan dan tekstil lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	2	10	12	1	0	0	0	14	24	3	14	24	3	
20	365	Industri barang kerajinan dan tekstil lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	6	9	2	1	0	0	0	0	0	0	5	24	6	5	24	8
21	371	Industri kimia, tekstil, dan kerajinan	0	1	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	6	5	0	11	11	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0	2	3	0	13	14	0	
22	381	Industri barang kerajinan dan tekstil lainnya	17	15	-1	27	37	3	12	11	0	39	45	2	40	46	2	135	154	6	10	18	3	30	44	9	5	23	6	2	3	0	37	89	17	170	247	23
23	382	Industri barang kerajinan dan tekstil lainnya	2	0	-1	5	13	3	3	4	0	4	5	0	6	7	0	20	29	3	3	5	1	2	6	2	1	1	0	2	1	0	8	15	2	26	44	5
24	383	Industri barang kerajinan dan tekstil lainnya	6	3	-1	16	23	2	6	3	-1	12	20	3	10	10	0	50	58	3	9	21	4	15	34	0	0	3	1	2	2	0	29	60	11	79	113	14
25	384	Industri barang kerajinan dan tekstil lainnya	3	3	0	19	26	2	7	8	0	3	5	1	29	41	4	61	81	7	0	12	2	4	15	4	3	15	4	4	1	-1	17	34	9	70	125	18
26	385	Industri barang kerajinan dan tekstil lainnya	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	6	1	0	4	1	3	11	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	3	1	4	14	5
27	390	Industri kerajinan	1	4	1	5	7	1	4	4	0	4	5	0	3	7	1	17	27	3	5	9	1	5	6	0	0	3	1	0	0	0	10	17	2	27	44	8
		J U M L A H	248	242	-2	252	323	24	149	109	13	406	549	40	302	443	47	1357	1718	120	168	353	42	198	431	78	53	290	48	78	42	9	445	1026	154	1901	2770	324

Sumber: Buletin Keresahan Industri Jabotabek - Bekasi, Ripikon, 1992

Legenda: APM = rata-rata per tahun  
= Turun per tahun



## Luas Pemanfaatan Kawasan Industri di Jawa Barat

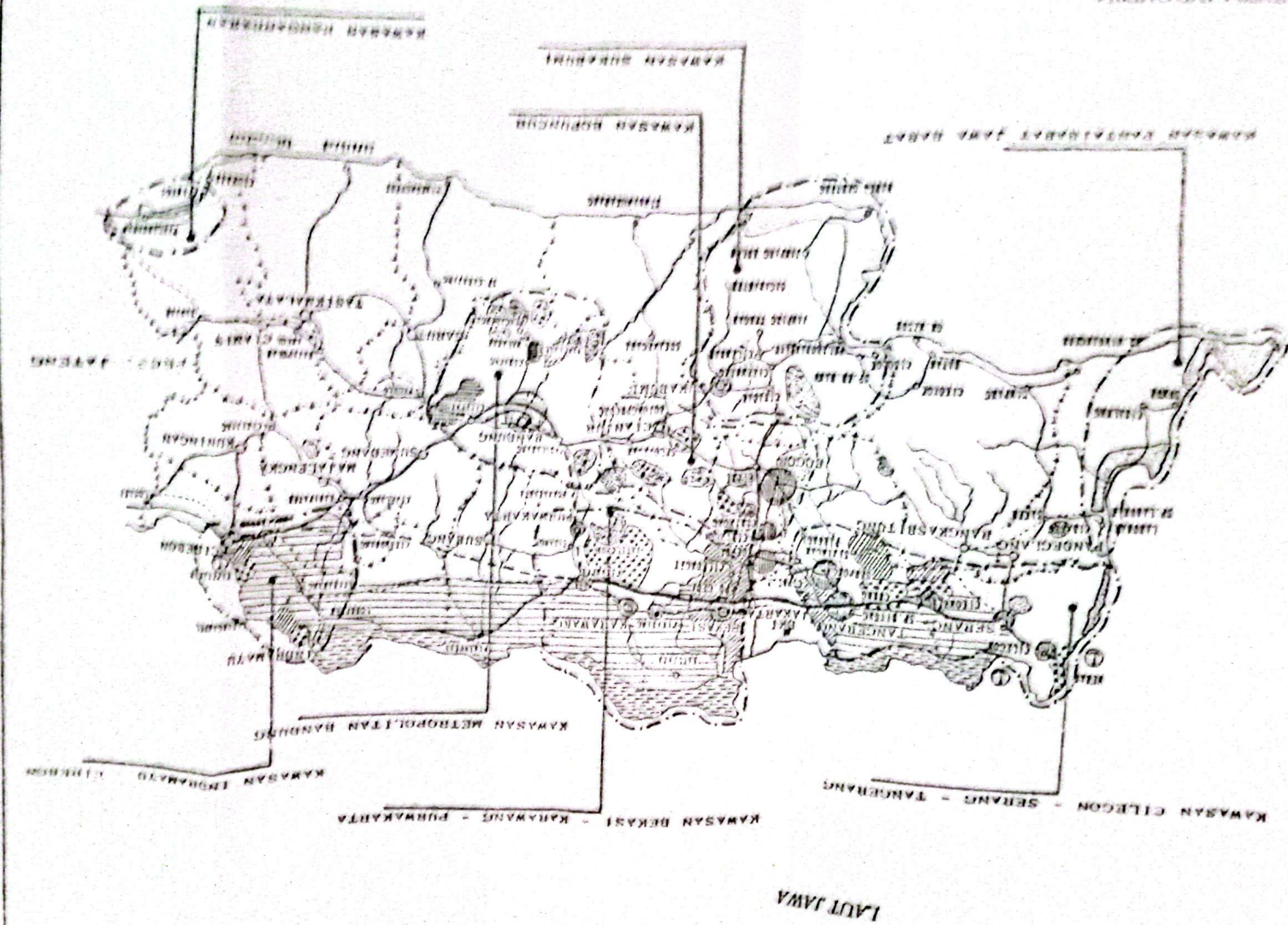
No.	KABUPATEN	TOTAL ALOKASI PENCADANGAN TANAH (HA)	LUAS TANAH YANG SUDAH DICADANGKAN (HA)	SISA ALOKASI PENCADANGAN TANAH (HA)	JUMLAH KAWASAN INDUSTRI
1	SERANG	3.500	3.500	0	1
2	TANGERANG	3.500	3.500	0	11
3	BOGOR	500	440	60	2
4	BEKASI	3.000	3.000	0	9
5	KARAWANG	5.500	5.500	0	14
6	PURWAKARTA	1.000	1.000	0	6
7	BANDUNG	600	600	0	2
8	SUMEDANG	400	200	200	1
9	CIREBON	500	0	500	0
TOTAL		18.000	17.200	760	63

Sumber : SK. Gubernur Jawa Barat No. 593/ SK.629-BAPPEDA/ 90





















Skala : 1 : 100.000

-  Kawasan Strategis
-  Perumahan
-  Industri
-  Industri Besar
-  Pariwisata
-  Perikanan
-  Pertambangan
-  Perikanan
-  Perikanan Tritis
-  Jalan Tol
-  Kawasan Jalan Tol
-  Pelabuhan

KAWASAN NYATRA BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	





## Lampiran-F

## RUMUS-RUMUS TEKNIK ANALISIS

## 1. Analisis Perkembangan Jumlah Penduduk.

Rumus : <sup>39</sup>

$$P_t = P_0 (1 + r)^n$$

Keterangan :

 $P_t$  = jumlah penduduk pada tahun akhir $P_0$  = jumlah penduduk pada tahun awal $r$  = pertumbuhan penduduk $n$  = selisih tahun

## 2. Analisis Pertambahan, Pertumbuhan, dan Konsentrasi.

Rumus :

- Pertambahan : <sup>40</sup>

$$\frac{\frac{N_{it} - N_{i0}}{N_{i0}}}{n} \times 100 \%$$

Keterangan

 $N_{it}$  = jumlah i di tahun akhir $N_{i0}$  = jumlah i di tahun awal $n$  = selisih tahun<sup>39</sup> Swardjoko Warpani, 1984, Analisis Daerah dan Kota.<sup>40</sup> Swardjoko Warpani, 1984, Analisis Daerah dan Kota.



- Pertumbuhan <sup>41</sup>

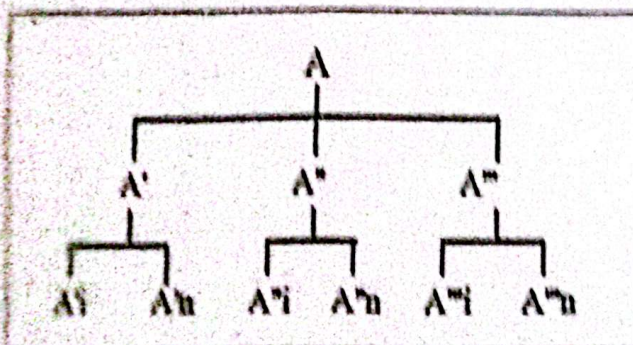
$$(r+1) = \frac{\log N_u - \log N_a}{n}$$

Keterangan :

 $N_u$  = jumlah  $i$  di tahun akhir $N_a$  = jumlah  $i$  di tahun awal $r$  = pertumbuhan $n$  = selisih tahun- Konsentrasi :<sup>42</sup>

$$\frac{i}{\Sigma i} \times 100\%$$

Keterangan :

 $i$  = sektor  $i$  $\Sigma i$  = jumlah sektor  $i$ 3. Analisis Pohon Industri <sup>43</sup><sup>41</sup> Sewardjoko Warpani, 1984, Analisis Daerah dan Kota<sup>42</sup> Sewardjoko Warpani, 1984, Analisis Daerah dan Kota<sup>43</sup> Regulasi F Industri



Keterangan :

A = sumber daya alam

A/A<sup>2</sup>A<sup>3</sup> = jenis industri yang dapat dihasilkan

#### \* Analisis Location Quotient (LQ)

Rumus<sup>31</sup>

$$LQ = \frac{S_i / N_i}{S / N} = \frac{S_i / S}{N_i / N}$$

Keterangan :

S<sub>i</sub> = jumlah buruh industri i di Kabupaten Cirebon

S = jumlah buruh seluruh industri di Kabupaten Cirebon

N<sub>i</sub> = jumlah buruh industri i di Jawa Bagian Barat

N = jumlah buruh seluruh industri di Jawa Bagian Barat

LQ > 1 : industri yang mempunyai potensi ekspor

LQ = 1 : industri yang dikonsumsi lokal

LQ < 1 : masih mengimpor industri tersebut dari daerah lain.

<sup>31</sup> Sasongko Mumpuni, 1982, Analisis Daerah dan Kota



PERATURAN

PERATURAN

Peraturan ini berlaku untuk semua instansi dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kecuali yang另有规定. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

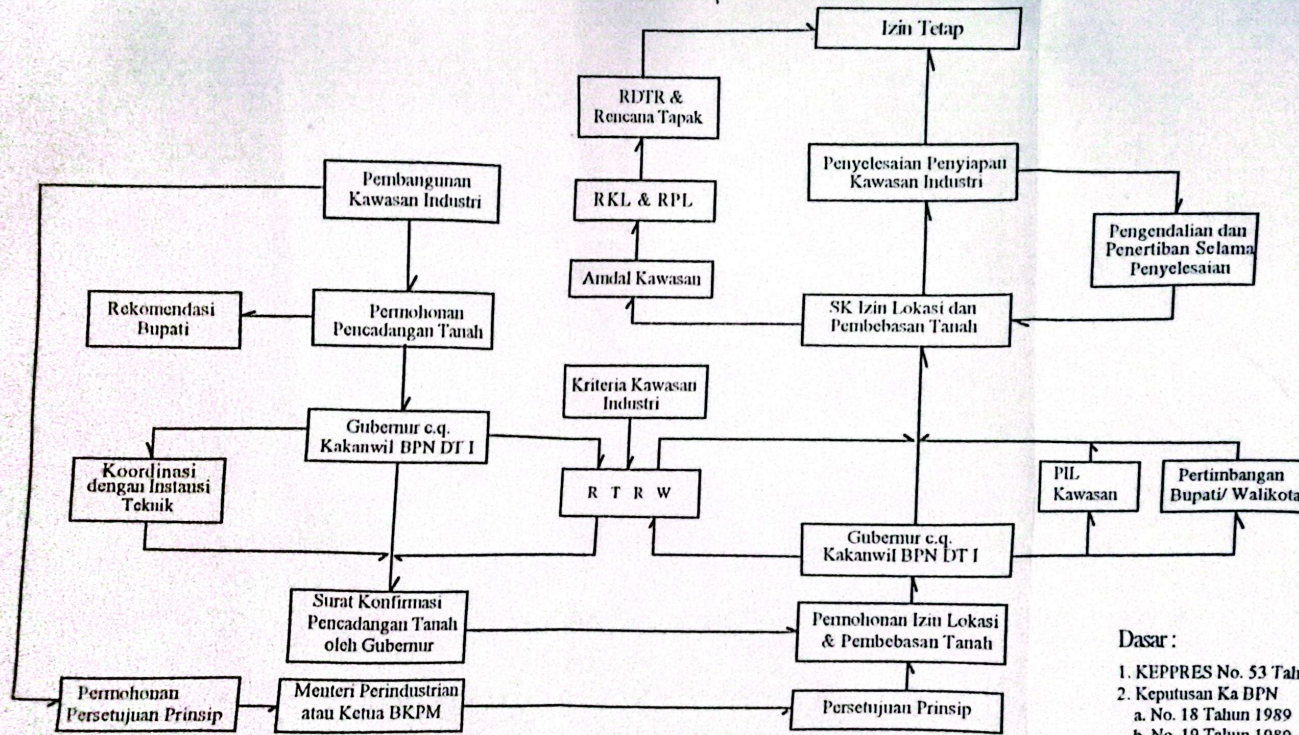
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Apabila ada peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, Peraturan ini akan mengabrogasi peraturan tersebut.

- 1. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 4. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 5. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 6. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 7. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 8. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 9. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 10. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Lampiran-G ( Lanjutan )

Proses Perizinan Pembangunan Kawasan Industri



Dasar :

1. KEPPRES No. 53 Tahun 1989
2. Keputusan Ka BPN
  - a. No. 18 Tahun 1989
  - b. No. 19 Tahun 1989
3. PP 29 Tahun 1985

Sumber : - The Physical of Industrial Estate, United Nations Pub., New York, 1962;  
 - Tim Koordinasi Kawasan Industri, 1992.



## Lampiran-H

## DAFTAR NEGATIF INVESTASI TAHUN 1991

No.	BIDANG USAHA	I	II	III
I.	BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL KECUALI APABILA MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU			
1	Susu Bubuk/ Susu Kental Kecuali terpadu dengan peternakan melalui Pola PIR atau sekurang-kurangnya 65% produksinya diekspor	x	x	x
2	Minyak Goreng Kelapa Sawit Kecuali terpadu dengan perkebunannya atau ada kejelasan pasokan bahan baku dengan kontrak kerjasama antara unit pengelolaan dengan produsen bahan baku atau sekurang-kurangnya 65 % produksinya diekspor	x	x	x
3	Industri Block Board Kecuali terpadu dengan kayu lapis	x	x	x
4	Penggergajian kayu Kecuali di Prop. Irian Jaya dan Timor Timur khusus untuk pemasaran dalam negeri.	x	x	x
5	Kayu Lapis Biasa Kecuali di Prop. Irian Jaya dan Timor Timur	x	x	x
6	Barang Setengah Jadi Rotan Kecuali di Propinsi di luar Pulau Jawa dan untuk pemasaran dalam negeri.	x	x	x
7	Barang Jadi dari Rotan Kecuali di Propinsi di luar Pulau Jawa terbuka untuk PMDN dan Non PMA/PMDN.	x	x	x
8	Pengolahan Barang Jadi Kayu Bakau Kecuali terpadu dengan pembudidayaan	x	x	x
9	Pengolahan Barang Setengah Jadi Kayu Bakau Kecuali terpadu dengan pembudidayannya dan untuk pemasaran dalam negeri.	x	x	x
10	Percetakan Kertas Berharga : 1. Perangko 2. Materai 3. Uang Kertas Bank 4. Paspor 5. Kartu Pos Kecuali untuk Perum Peruri	x	x	x



11	Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecuali manufacturing, sekurang-kurangnya sama dengan tingkat manufacturing yang telah dilakukan oleh industri sejenis sekarang di dalam negeri, atau sekurang-kurangnya 65% produksinya diekspor.	X	X	X
12	Ethyl Alkohol Kecuali technical grade.	X	X	X
13	Pupuk Nitrogen : 1. Urea 2. Amonium Sulphate Kecuali untuk/bekerjasama dengan BUMN.	X	X	X
14	Bahan Peledak dan Sejenisnya Kecuali untuk Perum Dahana	X	X	X
15	Ketel Uap (Utility Boiler) Kecuali manufacturing, sekurang-kurangnya sama dengan tingkat manufacturing yang telah dilakukan oleh industri sejenis sekarang di dalam negeri, atau sekurang-kurangnya 65% produksinya diekspor.			
16	Industri Motor Piston Pembakaran Dalam Non Automotif : 1. Motor Bakar Bensin s/d 8 kw (10 TK) 2. Motor Bakar Kerosene 3. Motor Bakar Diesel dengan daya s/d 25 kw (30 TK), 26 s/d 375 kw (31 s/d 100 TK) dan di atas 375 kw (500 TK). Kecuali manufacturing, sekurang-kurangnya sama dengan tingkat manufacturing yang telah dilakukan oleh industri sejenis sekarang di dalam negeri, atau sekurang-kurangnya 65% produksinya diekspor. gkat manufacturing yang telah dilakukan oleh industri sejenis sekarang di dalam negeri, atau sekurang-kurangnya 65% produksinya diekspor.	X	X	X
17	Industri Alat-alat Berat : 1. Buldozer dengan daya 75 s/d 300 TK 2. Loader dengan daya 100 s/d 300 TK 3. Grader dengan daya 100 s/d 150 TK 4. Excavator dengan daya 60 s/d 150 TK 5. Road Boller (termasuk jenis vibro) dgn kapasitas 2 s/d 4 ton 6. Forklift dengan penggerak Motor Diesel. Kecuali manufacturing, sekurang-kurangnya sama dengan tingkat manufacturing yang telah dilakukan oleh industri sejenis sekarang di dalam negeri, atau sekurang-kurangnya 65% produksinya diekspor.	X	X	X



18	Industri Kereta Rel, bagian-bagian dan perlengkapannya. Kecuali untuk bekerjasama dengan PT. INKA	X	X	X
19	Medium & Light Truck, Pick Up, Bus, dan Mini Bus Kecuali manufacturing, sekurang-kurangnya sama dengan tingkat manufacturing yang telah dilakukan oleh industri sejenis sekarang di dalam negeri, atau sekurang-kurangnya 65% produksinya diekspor.	X	X	X
20	Kendaraan Serba Guna/ Jeep Kecuali manufacturing, sekurang-kurangnya sama dengan tingkat manufacturing yang telah dilakukan oleh industri sejenis sekarang di dalam negeri, atau sekurang-kurangnya 65% produksinya diekspor.	X	X	X
21	Motor Diesel dan Motor Bensin Kendaraan Niaga. Kecuali manufacturing, sekurang-kurangnya sama dengan tingkat manufacturing yang telah dilakukan oleh industri sejenis sekarang di dalam negeri, atau sekurang-kurangnya 65% produksinya diekspor.	X	X	X
22	Pesawat Terbang Bermesin Jet : 1. Pesawat Angkut Penumpang 2. Pesawat Angkut Barang Kecuali untuk/bekerjasama dengan PT. IPTN	X	X	X
23	Pesawat Terbang Propeller : 1. Pesawat Angkut Penumpang 2. Pesawat Angkut Barang Kecuali untuk/bekerjasama dengan PT. IPTN	X	X	X
24	Helikopter Kecuali untuk/bekerjasama dengan PT. IPTN	X	X	X
25	Mesin Pesawat Terbang 1. Mesin piston pembakar 2. Turbo jet 3. Turbo propeller 4. Turbo gas lain 5. Run jet 6. Pulsa jet 7. Turbo fan Kecuali untuk/bekerjasama dengan PT. IPTN	X	X	X
26	Peralatan dan perlengkapan Pesawat Terbang : 1. Baling-baling pesawat terbang/helikopter 2. Alat pendarat Kecuali untuk/bekerjasama dengan PT. IPTN	X	X	X
II.	<b>BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL, KECUALI UNTUK PROYEK BARU YANG SEKURANG-KURANGNYA 65 % PRODUKSINYA DIEKSPOR ATAU PERLUASAN</b>			



27	Peternakan ayam bibit nenek (grand parent stock) untuk menghasilkan anak ayam bibit induk (parent stock):	x	x	x
28	Peternakan ayam bibit induk (parent stock) untuk menghasilkan ayam niaga (final stock).	x	-	-
29	Vaksin septichemia epizooticae, Brucellosis, anthrax, Penyakit Mulut & Kulit dan Rabies untuk hewan.	x	-	-
30	Tepung Terigu	x	x	x
31	Rokok/Sigaret Kretek	x	x	x
32	Korek Api (batangan kayu, karton & sejenisnya).	x	x	x
33	Baja Lembaran Karbon Rendah Canai Dingin.	x	x	x
34	Baja Lembaran Lapis Timah	x	x	x
35	Kendaraan Penumpang Sedan dan Station Wagon.	x	x	x
36	Formulasi Obat a. Farmasi formulasi b. Tradisional (jamu).	x	-	-
III.	<b>BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL PROYEK BARU DAN PERLUASAN, KECUALI APABILA SELURUH (100 %) PRODUKSINYA DIEKSPOR</b>			
37	Peternakan Ayam Bibit Galur Murni (pure line) & atau Ayam Bibit Dasar (great grand parent stock) untuk menghasilkan ayam bibit nenek (grand parent stock).	x	x	x
38	Pemanis Buatan (siklamat dan sakarin)	x	x	x
39	Minuman Keras Perluasan dan proyek baru harus dalam Kawasan Berikat.	x	x	x
40	Anggur dari buah-buahan dan sejenis Perluasan dan proyek baru harus dalam Kawasan Berikat	x	x	x
41	Bir Perluasan dan proyek baru harus dalam Kawasan Berikat	x	x	x
42	Petasan (Mercon) Perluasan dan proyek baru harus dalam Kawasan Berikat	x	x	x
43	Disposable Gaslighter Perluasan dan proyek baru harus dalam Kawasan Berikat	x	x	x
44	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Perluasan dan proyek baru harus dalam Kawasan Berikat	x	x	x
IV.	<b>BIDANG USAHA JASA YANG TERTUTUP PENANAMAN MODAL</b>			
45	Angkutan Umum Penumpang Antar Kota/Angkutan Taksi	x	-	-
46	Pelayanan Rakyat (Lokal)	x	-	-



47	Penerbangan Berjadwal/ Borongan	x	-	-
48	Perbengkelan Pesawat Udara dan komponen-komponennya yang beroperasi di Bandara.	x	-	-
49	Pedagang Eceran	x	-	-
50	Jasa Penunjang Perdagangan : Periklanan	x	-	-
51	Stasiun Penyiaran Televisi Swasta	x	-	-
52	Jasa Penyiaran Radio	x	-	-
53	Jasa Pembangunan dan Pengusahaan Gedung-gedung Bioskop	x	-	-
54	Jasa Kontraktor di bidang Pengusahaan Gedung	x	-	-
V.	BIDANG USAHA YANG TERTUTUP MUTLAK UNTUK PENANAMAN MODAL			
55	Kasino/Perjudian	x	x	x
56	Pemanfaatan dan Pengusahaan Sponge (bunga karang) Pemanfaatan dan Pengusahaan Sponge (bunga karang)	x	x	x
57	Ganja dan sejenisnya	x	x	x
58	Veneer (rotary)	x	x	x
59	Panta Chlorophenol	x	x	x
60	Dichloro Diphenil Trichloro Ethane (DDT)	x	x	x

Keterangan :

I	= PMA	x	= Tertutup
II	= PMDN	-	= Terbuka
III	= Non PMA/PMDN		

Sumber : Keppres No. 23 Tahun 1991.

Adapun penjelasan tiap kelompok bidang usaha tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Kelompok I : Bidang-bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk investasi baru maupun perluasan dalam rangka PMA, PMDN, dan Non PMA/PMDN, kecuali apabila investasi yang akan dilakukan memenuhi persyaratan yang khusus ditetapkan untuk bidang dimaksud. Produk dari industri dalam katagori ini dapat dipasarkan untuk kebutuhan dalam negeri atau ekspor. Bidang usaha yang termasuk dalam katagori ini ada 26 jenis.



- Kelompok II :** Bidang-bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk investasi baru dalam rangka PMA, PMDN, dan Non PMA/PMDN, kecuali apabila sekurang-kurangnya 65 % produksinya akan diekspor. Namun demikian, investasi yang telah ada dalam bidang usaha tersebut terbuka untuk perluasan tanpa keharusan ekspor. Bidang usaha yang termasuk dalam klasifikasi ini ada 10 jenis.
- Kelompok III :** Bidang-bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk investasi baru atau perluasan dalam rangka PMA, PMDN, dan Non PMA/PMDN, kecuali apabila seluruh (100 %) produksinya akan diekspor. Bidang usaha yang termasuk dalam klasifikasi ini ada 8 jenis.
- Kelompok IV :** Bidang usaha jasa yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal baik proyek baru maupun perluasan. Bidang usaha jasa yang termasuk dalam katagori ini ada 10 jenis.
- Kelompok V :** Bidang-bidang usaha yang dinyatakan mutlak tertutup untuk proyek baru maupun perluasan dalam rangka PMA, PMDN, dan Non PMA/PMDN, walaupun 100 % produksinya akan diekspor. Bidang usaha yang termasuk dalam klasifikasi ini ada 6 jenis.



## Lampiran-I

**Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Konsumtif  
di Kabupaten Cirebon  
Tahun 1987 - 1989**

KELOMPOK UMUR	TAHUN		r (%)
	1987	1989	
Usia Produktif (15 - 64 tahun)	783.355	812.709	1,86
Usia Konsumtif (0 - 14 tahun dan 65 tahun ke atas)	727.112	728.349	0,09
Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon	1.510.467	1.541.058	1,01

Sumber : Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 1989